

Dr. Evitayani S.Pt., M.Agr
Prof. Dr. Ir. Lili Warly, M.Agr
Prof. Dr. James Hellyward, M.Sc
Zakirman S.Pt

Feasibility Study
**PEMBANGUNAN
KAWASAN
SAPI PERAH
BERBASIS PAKAN
HIJAUAN ORGANIK**

Di Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan
Mentawai



LPPM Universitas Andalas
Gedung Rektorat Lantai 2
Kampus Unand Limau Manis
Kota Padang, Sumatera Barat - Indonesia
www.lppm.unand.ac.id
Tel. 0751-72645

ISBN 978-623-6877-54-8



diterbitkan oleh:
LPPM Universitas Andalas



Riset Pengembangan

**“Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sapi perah
Berbasis Pakan Hijauan Organik Di Sipora Utara,
Kabupaten Kepulauan Mentawai”**

Ditulis Oleh :

Dr. Evitayani S.Pt.,M.Agr

Prof. Dr. Ir. Lili Warly, M.Agr

Prof. Dr. James Hellyward , M.Sc

Zakirman S.Pt

Universitas Andalas

November, 2020



Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sapi Perah Berbasis Pakan Hijauan Organik
Di Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Penulis :

Evitayani, Lili Warly, James Hellyward, Zakirman

ISBN : 978-623-6877-54-8

Penerbit :

LPPM – Universitas Andalas

Gedung Rektorat Lantai 2 Kampus Unand Limau Manis Kampus Unand Limau Manis
Kota Padang Sumatera Barat Indonesia

Web: www.lppm.unand.ac.id

Telp. 0751-72645

Email: lppm.unand@gmail.com

Hak Cipta dilindungi Undang Undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun
tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah segala puji kami sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua dalam menjalankan aktifitas pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kajian akademis untuk menyusun “*Feasibility Study* Pembangunan kawasan sapi Perah di Sipora Utara, kepulauan Mentawai” merupakan hasil dari riset pengembangan yang berjudul “Integrasi Program Desa Pilot Guna Membangun Kawasan Melalui Peningkatan Monolourin Untuk Imunitas Melawan Covid-19 Dengan Pemberian Vco Probiotik Pada Susu Sapi Perah Di Desa Sido Makmur, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nomor kontrak T:14/UN.16.17/PT.01.03/PP-Pangan. Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah untuk menciptakan daerah ini dapat memenuhi kebutuhan susu dan hasil lainnya dari sapi perah. Oleh karena itu, perlu kerjasama dengan harapan pembangunan peternakan khususnya sapi perah untuk menghasilkan kajian yang baik. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai dan jajarannya serta Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kelompok Ternak Sapi Perah yang telah mendukung penyelenggaraan kegiatan ini. Serta, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unand dan Kemeristek Dikti yang sudah membiayai penelitian pengembangan ini.

Luaran akhir dari riset pengembangan ini adalah berupa *Feasibility Study* yang dapat tersusun atas bantuan banyak pihak, untuk itu terima kasih diucapkan atas kontribusi yang telah diberikan oleh instansi terkait lingkup pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terima kasih juga disampaikan kepada beberapa stakeholders terkait yang telah memberikan masukan untuk kesempurnaan Buku ini.

Akhir kata, kami berharap luaran kajian ini dapat membantu pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

20 November 2020

Tim Peneliti Riset Pengembangan
Evitayani, dkk

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Sasaran	4
1.4. Luaran / Output	5
1.5. Pengertian dan Dasar Hukum	5
1.5.1. Pengertian	5
1.5.2. Dasar Hukum	6
1.6. Metode Penelitian	7
1.7. Kerangka Kerja Pelaksanaan	12
1.8. Sistematika	14
BAB II. RUJUKAN TEORI	17
2.1. Pembangunan Peternakan Sapi perah di Indonesia	17
2.2. Perencanaan Pembangunan Wilayah	22
2.3. Kawasan Sentra Pembangunan Peternakan	25
2.4. Kebijakan Publik	25
2.5. Aspek-Aspek dalam Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah.....	27
BAB III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.....	31
3.1. Kondisi Geografis	31
3.2. Pemerintahan	37
3.3. Demografi.....	38

3.4. Kondisi Peternakan	42
3.5. Kondisi Transportasi	42
3.6. Keuangan Daerah	44
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHSAN	46
4.1. Produk Kebijakan Tentang Pembangunan Peternakan Sapi Perah yang dimiliki pemerintah	46
4.2. Sarana dan Prasarana Pembangunan Peternakan Sapi perah .	48
4.3. Kondisi Ketersediaan Input Produksi Peternakan Sapi perah	52
4.4. Sosial Ekonomi Masyarakat Calon Pelaku Utama (peternak sapi perah) dalam Melaksanakan Pembangunan Peternakan Sapi Perah	54
4.5. Kelembagaan Pendukung Pembangunan Peternakan	58
4.6. Sumber Permodalan / Pendanaan Program	59
4.7. Kondisi Pemasaran	60
4.8. Kondisi Kerjasama antar Lembaga dalam Pembangunan Peternakana Sapi perah	62
BAB V. PEMETAAN KAWASAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN SAPI PERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	67
5.1. Penentuan Lokasi Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah...	67
5.2. Pemetaan Wilayah Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah...	69
BAB VI. ROAD MAP PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA PETERNAKAN SAPI PERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI	71
BAB VII. STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA PETERNAKAN SAPI PERAH	78
7.1. Strategi Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah	83
7.2. Kebijakan Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.....	91

7.3. Program Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah	93
BAB VIII. PENUTUP	94
8.1. Kesimpulan	94
8.2. Saran	122
DAFTAR RUJUKAN	124

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1.	Teknik Analisa Data Berdasarkan Fokus Penelitian	11
Tabel 2.1.	Letak Geografis Masing- Masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	32
Tabel 2.2.	Batas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	33
Tabel 2.3.	Luas Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Tinggi Ibu Kota Kecamatan dari Permukaan Laut	34
Tabel 2.4.	Jarak Tempuh Ibu Kota Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat	34
Tabel 2.5.	Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	35
Tabel 2.6.	Jumlah Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai	36
Tabel 2.7.	Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	37
Tabel 2.8.	Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai	38
Tabel 2.9.	Presentase Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai	39
Tabel 2.10.	Persentase Penduduk Usia Dewasa Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai	40
Tabel 2.11.	Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai	42

Tabel 3.1.	Kondisi Produk Kebijakan yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terkait dengan Pembangunan Peternakan Sapi perah.....	Kondisi	46
Tabel 3.2.	Sarana dan Prasarana Pembangunan Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	Kondisi Input	48
Tabel 3.3.	Produksi Peternakan Sapi Perah yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....		51
Tabel 3.4.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Calon Pelaku Utama Pembangunan Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....		53
Tabel 3.5.	Kelembagaan Pendukung yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....		57
Tabel 3.6.	Sumber Permodalan Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai		58
Tabel 3.7.	Segmentasi Pasar Ternak Sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....		60
Tabel 4.1.	Dasar Hukum Perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai		77
Tabel 4.2.	Teori Utama tentang pengembangan aglomerasi kawasan		83
Tabel 4.3.	Strategi Pengembangan kawasan Usaha Sapi perah yang pernah ada di Sumbar		85

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Kerangka Kerja Pelaksanaan Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah Kabupaten Kepulauan Mentawai	13
Gambar 3.1.	Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai	17
Gambar 4.1.	Pilihan Saluran Pemasaran Komoditi Ternak Sapi perah	19
Gambar 4.2.	Sinergitas OPD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pembangunan Sentra Kawasan Peternakan Sapi perah	20
Gambar 5.1.	Peta Calon Lokasi untuk Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai	30
Gambar 5.4.	Peta Calon Lokasi untuk Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah di Kecamatan Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai	63
Gambar 6.1.	Road Map Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.....	70

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Swasembada susu nasional saat ini masih sulit tercapai, hal ini terlihat lebih dari 75 persen pasokan susu di penjuru nusantara didominasi oleh peternak asing, dan sisanya 25 persen lagi untuk pemenuhan susu nasional berasal dari kontribusi peternak di Tanah Air (Ditjenak, 2015). Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai swasembada susu nasional adalah dengan meningkatkan pemberian bantuan kepada peternak dan sekaligus memperbanyak ternak sapi perah (Edwardi, 2016). Menurut Edwardi (2016), saat ini kebijakan pengembangan peternakan sapi perah di Sumatera Barat lebih difokuskan pada peningkatan populasi berbasis pakan lokal dan integrasi dengan usaha lain, peningkatan konsumsi serta pengembangan pemasaran lokal. Kota Padang Panjang sebagai mitra industri bagi masyarakat mentawai untuk beternak sapi perah merupakan salah satu daerah sentra pengembangan ternak sapi perah Propinsi Sumatera Barat. Populasi sapi perah di kota Padang Panjang menempati urutan pertama, dengan jumlah sapi perah 343 ekor. (Dinas Peternakan Sumatera Barat, 2010). Menurut data BPS pada tahun 2010 produksi susu sapi kota Padang Panjang yaitu 522,495 liter. Jumlah populasi sapi perah di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai tahun 2010 yaitu dari 244 ekor menjadi 343 ekor. Berdasarkan peningkatan jumlah populasi ternak sapi perah tersebut mengindikasikan bahwa terdapat potensi dalam pengembangan usaha sapi perah di Kota Padang Panjang. Oleh sebab itu dengan adanya mitra industri dari kelompok ternak Permata Ibu diharapkan dapat membuat masyarakat Mentawai dapat pula menghasilkan pabrik susu sapi perah. Dimana nantinya akan dibangun rumah susu. Di rumah susu itu ada labor mini penguji sampel susu, alat pasteurisasi susu, *culling unit* (penyimpan susu), alat paking dan wadah pemasaran

Salah satu sumber pangan hewani yang paling populer adalah daging sapi dan susunya. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan/ pengembangan peternakan diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam negeri agar

Feasibility study
Pembangunan kawasan sapi perah di Sipora Utara, Kepulauan Mentawai

ketersediaan dan keamanan pangan asal ternak lebih terjamin serta tidak tergantung dari impor dan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Strategisnya isu pemenuhan pangan hewani juga terdapat dalam Visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tertuang dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu mewujudkan daerah yang terbuka, mandiri dan maju. Menyambung Visi tersebut, maka pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai pada periode 2017-2022 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai salah satunya berkeinginan untuk mewujudkan kemandirian pangan. Hal ini sejalan dengan pemerintah pusat (tertuang dalam RPJMN 2015-2019) yang berkeinginan untuk mewujudkan kedaulatan pangan.

Pencirian terwujudnya kedaulatan pangan terlihat dari kekuatan sebuah daerah mengatur urusan pangannya secara mandiri. Untuk mewujudkannya, daerah harus mampu menciptakan ketahanan pangan, pengaturan kebijakan dan mampu melindungi serta mensejahterakan pelaku utama pangan, terutama petani, peternak dan nelayan. Dari sekian banyak komoditi untuk memenuhi pangan masyarakat, sub sektor peternakan menjadi salah satu perhatian baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Begitu juga dengan pemerintah Kabupaten Kepulauan mentawai yang menjadikan sub sektor peternakan sebagai leading pemenuhan susu masyarakat Mentawai.

Pilihan strategis yang dapat diambil oleh pemerintah daerah adalah melakukan pembangunan peternakan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan. Salah satu komoditi peternakan yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah susu. Selama ini kebutuhan tersebut masih banyak dipasok dari daerah Sumatera Barat (Sumbar) daratan. Tentunya kondisi tersebut tidak bisa dibiarkan terus-menerus jika pemerintah hendak visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada data statistik yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun terakhir adalah 86.981 jiwa sedangkan populasi ternak sapi perah yang dimiliki daerah tidak ada Kondisi ini membuktikan bahwa belum bisanya kesehatan masyarakat terpenuhi.

Fenomena berikutnya adalah kondisi Kabupaten Kepulauan Mentawai yang memiliki keterisolasian fisik yaitu wilayah dengan banyak pulau dan keterisolasian sosial budaya serta ekonomi. Seluruh keterisolasian yang dimiliki daerah ini menjadi tantangan untuk mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan masyarakat Mentawai. Oleh karenanya pemerintah daerah dituntut lebih cermat dalam merumuskan kebijakan untuk pembangunan di sektor peternakan sapi perah.

Untuk mengatasi permasalahan di atas, perlu dilakukan tindakan komprehensif dan strategis yang bertujuan untuk meminimalisir kegagalan pencapaian tujuan pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemerintah membutuhkan perencanaan yang baik sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menjawab tantangan di atas, pemerintah perlu menyusun **“Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sapi perah di Sipora Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai”** sehingga pencapaian visi dan misi pembangunan daerah (khususnya ketahanan pangan hewani berupa susu) dapat terlaksana dengan baik dan lebih terarah .

1.2. Tujuan

Penyusunan study kelayakan pembagunan kawasan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan yang dapat menjadi pedoman oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Selanjutnya dokumen ini dapat menjadi acuan pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Mentawai untuk merumuskan program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam pembangunan peternakan sapi perah. Sehingga pembangunan peternakan sapi perah di daerah ini memiliki arah yang jelas untuk membantu mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah :

1. Mengidentifikasi Produk Kebijakan Tentang Pembangunan Peternakan Sapi perah yang dimiliki pemerintah.

2. Mengidentifikasi dan Menganalisis Sarana dan Prasarana Pembangunan Peternakan Sapi perah.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis Ketersediaan Input Produksi Peternakan Sapi perah.
4. Mengidentifikasi dan menganalisis Sosial Ekonomi Masyarakat Calon Pelaku Utama (peternak sapi perah) dalam Melaksanakan Pembangunan Peternakan Sapi perah.
5. Menganalisis kondisi Kelembagaan Pendukung Pembangunan Peternakan.
6. Menganalisis Sumber Permodalan/Pendanaan Program
7. Menganalisis Kondisi Pemasaran
8. Mengkontruksi Pola Kerjasama Antar Lembaga dalam Pembangunan Peternakan Sapi perah.
9. Memetakan atau Menetapkan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah.
10. Road Map Pencapaian Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah
11. Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.

1.3. Sasaran

Diharapkan dengan adanya Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat membantu dan memudahkan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, program dan menjalankan kegiatan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Selain itu, dapat juga membantu terwujudnya sinergitas antar lembaga, institusi pemerintah dan pihak terkait lainnya seperti Perguruan Tinggi, Swasta (pelaku usaha peternakan sapi, NGO dan masyarakat (peternak).

1.4. Luaran / Output

Adapun luaran utama kegiatan ini adalah menghasilkan dokumen Feasibility

*Feasibility Study
Pembangunan* *Kawasan* *Sentra* *Peternakan* *Sapi* *perah*

Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan luaran turunannya adalah:

1. Pemetaan kawasan sentra pembangunan peternakan sapi perah.
2. Roap Map pembangunan peternakan sapi Perah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Pola sinergitas instansi pemerintah dalam dan luar Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan peternakan sapi perah.

1.5. Pengertian dan Dasar Hukum

1.5.1. Pengertian

Beberapa konsep dan istilah yang digunakan dalam dokumen Feasibility Study ini perlu didefinisikan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaannya, diantaranya adalah:

1. Pembangunan peternakan sapi perah adalah rangkaian kegiatan untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik pada sub sektor peternakan sapi perah sehingga terwujudnya kesejahteraan masyarakat peternak dan masyarakat umum.
2. Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang digunakan untuk pedoman dalam merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan peternakan sapi perah, sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik dan terarah.
3. Ketahanan Pangan adalah terjaminannya ketersediaan dan mudah diaksesnya komoditi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah.
4. Road Map Pembangunan Peternakan Sapi perah adalah peta periodisasi pencapaian pembangunan peternakan sapi perah.

5. Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah merupakan salah satu bentuk perencanaan ruang untuk sektor peternakan yang diharapkan dapat mendorong percepatan peningkatan nilai tambah dan diikuti peningkatan produksi pada sentra-sentra produksi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang relevan.
6. Wilayah prioritas pembangunan peternakan sapi perah adalah daerah yang ditetapkan sebagai lokasi utama pelaksanaan pembangunan peternakan sapi perah.
7. Input produksi peternakan sapi perah adalah unsur-unsur pokok yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha tani ternak sapi perah.
8. Lembaga permodalan adalah suatu lembaga yang dapat membantu pembiayaan kegiatan peternakan sapi perah baik berupa lembaga bank maupun lembaga bukan bank.
9. Teknologi Hasil Produksi Ternak Sapi perah adalah teknologi berupa susu, yougort, sosis yang berbahan organik.
10. Hijauan Pakan Ternak adalah hijauan atau rumput-rumputan yang memiliki angka kecukupan gizi yang tepat untuk ternak ruminansia, tidak semua rumput dapat dikategorikan hijauan makanan ternak. Hijauan pakan ternak yang diberikan pupuk organik Sarana Tani Utama dan dimasukkan kedalam pakan komplit merupakan pakan yang sudah teruji dan terpatenkan.
11. Kandang adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat pemerah susu dan hasil olahan susu lainnya.

Adapun landasan hukum yang dapat digunakan untuk menyusun dokumen Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah:

1. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Ketahanan Pangan.

2. Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Budi Daya Sapi perah yang Baik.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor.....Tahun..... Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Rerencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Mentawai 2017-2022.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian terpenting yang dapat menentukan pelaksanaan kajian penyusunan Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, pada bagian ini dijabarkan beberapa komponen yang dibutuhkan dalam metode penelitian, diantaranya adalah:

1) Desain Penelitian

Disain penelitian merupakan rencana atau struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitiannya. Mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka desain penelitian yang digunakan adalah mixed methods research

2) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ditetapkan berdasarkan tingkat eksplanasinya, oleh karena itu penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian mengenai status terakhir dari subyek penelitian. Penelitian deskriptif berusaha untuk memperoleh deskriptif lengkap dan akurat dari suatu situasi.

3) Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sehubungan dengan desain mixed methods research yang memadukan metode kualitatif dan kuantitatif, maka subjek penelitian ini terdiri dari informan kunci dan responden penelitian. Oleh karena itu metode kuantitatif yang digunakan dalam penelitian bersifat penguat metode penelitian utamanya yaitu metode kualitatif, maka seluruh informan yang digunakan dalam penelitian ini dapat langsung dijadikan responden penelitian.

Informan dan responden tersebut berasal dari stakeholders terkait pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Teknik pengambilannya, digunakan perpaduan teknik purposif dan snow ball. Oleh karena itu, jumlahnya belum dapat ditetapkan diawal penelitian.

4) Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan diskusi kelompok dengan informan dan responden. Untuk data sekunder didapatkan dari berbagai instansi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berkaitan dengan kajian ini, seperti Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kabupaten Kepulauan Mentawai, BAPPEDA, Dinas PUPR, dan lainnya.

5) Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer, digunakan teknik wawancara, kuesioner, fokus group diskusi (FGD) dan catatan dari observasi non-partisipant. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik dokumentasi.

6) Fokus Penelitian

Terdapat beberapa fokus dalam kajian ini, diantaranya adalah:

- a) Kondisi Produk Kebijakan Tentang Pembangunan Peternakan Sapi perah yang dimiliki pemerintah.
- b) Kondisi Sarana dan Prasarana Pembangunan Peternakan Sapi perah.
- c) Kondisi Ketersediaan Input Produksi Peternakan Sapi perah.
- d) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Calon Pelaku Utama (peternak sapi perah) dalam Melaksanakan Pembangunan Peternakan Sapi perah.
- e) Kondisi Kelembagaan Pendukung Pembangunan Peternakan.
- f) Kondisi Sumber Permodalan/Pendanaan Program
- g) Kondisi Pemasaran dan hasil olahan susu
- h) Kondisi Kerjasama antar Lembaga dalam Pembangunan Peternakan Sapi perah.

- i) Gambaran wilayah yang potensi untuk menjadi Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah:
 - Data sosial budaya
 - Data ekonomi kawasan
 - Data keadaan kawasan : luas, topografi, iklim, jenis lahan, dll.
 - Data sumber daya pendukung input produksi peternakan sapi: status lahan, ketersediaan sumber pakan ternak, dll.
- j) Road Map Pencapaian Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah
- k) Kebijakan, Strategi dan Program Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.

7) Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam kajian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Untuk data kualitatif alat analisisnya adalah teknik sintesis, interperatif dan pendekatan kerangka kerja logis atau Logical Framework Approachs (LFA). Alat analisis yang digunakan pada data kuantitatif adalah statistik sederhana untuk mendapatkan rata-rata dan persentase tanggapan responden, selain itu penjaringan data kuantitatif digunakan teknik skala gutman. Lebih spesifiknya teknik analisis data yang digunakan dapat dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian, seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1. Teknik Analisa Data Berdasarkan Fokus Penelitian

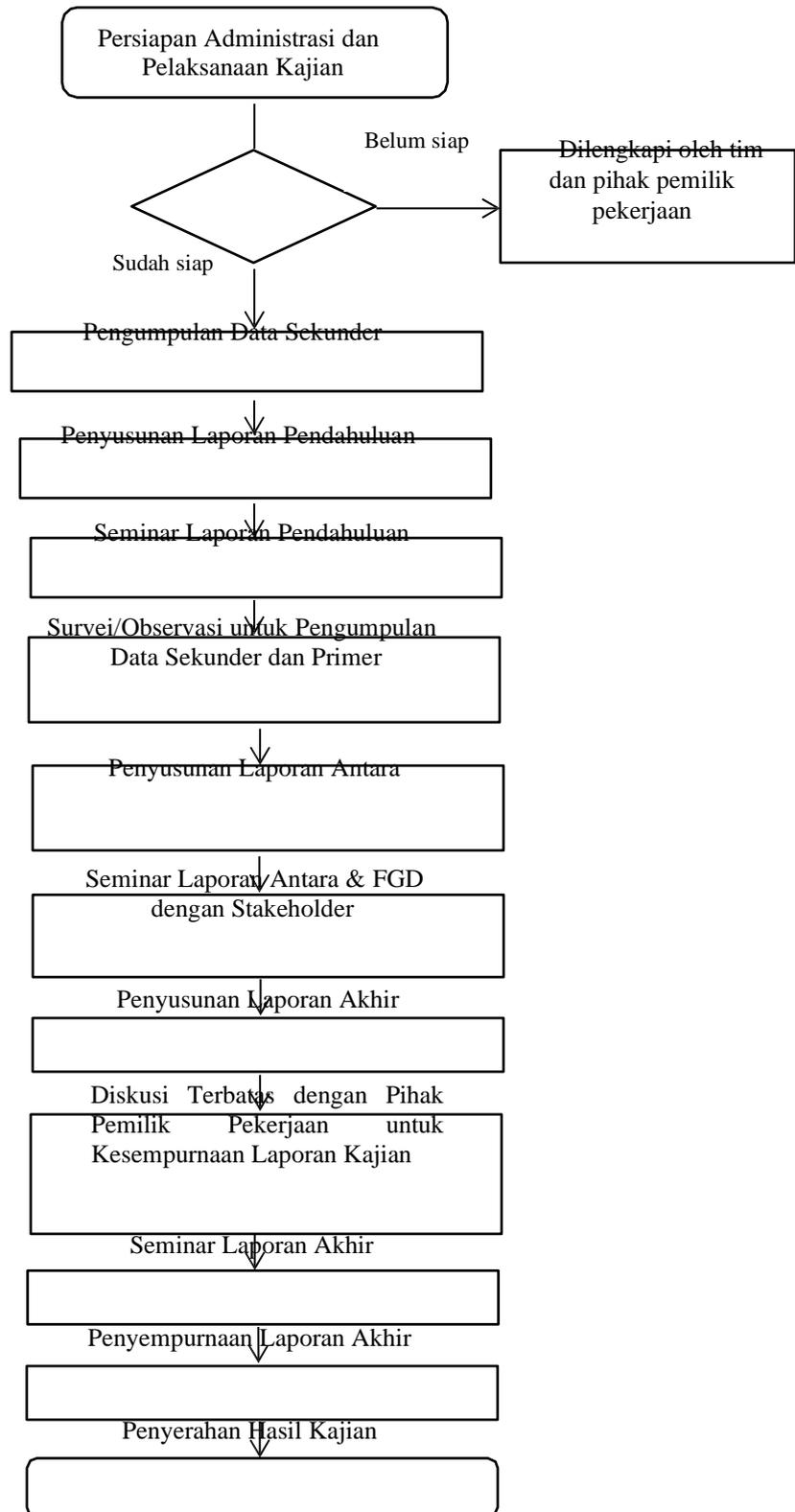
No	Fokus Penelitian	Teknik Analisa Data
1.	Kondisi Produk Kebijakan Tentang Pembangunan Peternakan Sapi perah yang dimiliki pemerintah.	Deskriptif kuantitatif dengan bantuan skala Gutman yang dianalisis dengan cara statistik sederhana untuk mendapatkan rata-rata dan persentase.
2.	Kondisi Sarana dan Prasarana Pembangunan Peternakan Sapi Perah.	
3.	Kondisi Ketersediaan Input Produksi Peternakan Sapi perah.	
4.	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Calon Pelaku Utama	

	(peternak sapi Perah) dalam Melaksanakan Pembangunan Peternakan Sapi perah.	
5.	Kondisi Kelembagaan Pendukung Pembangunan Peternakan.	
6.	Kondisi Sumber Permodalan / Pendanaan Program.	
7.	Kondisi Pemasaran	
8.	Kondisi Kerjasama antar Lembaga dalam Pembangunan Peternakan Sapi perah	Deskriptif kualitatif dengan alat analisisnya sintesis dan interpertatif.
9.	Gambaran wilayah yang potensi untuk menjadi Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.	Analisis kawasan melalui teknik analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif yang mengacu pada model pengembangan kawasan sisi kebutuhan.
10.	Road Map Pencapaian Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.	Deskriptif kualitatif dengan alat analisisnya sintesis dan interpertatif.
11.	Strategi, Kebijakan dan Program Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.	Deskriptif kualitatif dengan alat analisisnya Logical Framework Approachs (LFA)

1.7. Kerangka Kerja Pelaksanaan

Kajian untuk menyusun Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah Kabupaten Kepulauan Mentawai dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan. Tahapan-tahapan tersebut dapat digambarkan melalui diagram alir sebagai berikut.

kondisi



Gambar 1.1. Kerangka Kerja Pelaksanaan Kajian Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah Kabupaten Kepulauan Mentawai

1.8. Sistematika

Adapun sistematika penulisan kajian Feasibility Study Pembangunan kawasan Sentra Peternakan Sapi perah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini adalah:

BAB I. Pendahuluan

Bagian ini terdiri dari Latar Belakang, Tujuan, Sasaran, Luaran / Output, Pengertian dan Dasar Hukum, Metode Penelitian, Kerangka Kerja Pelaksanaan, dan Sistematika. Bab pendahuluan merupakan dasar berpikir dan menjawab alasan akan pentingnya kajian ini dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB II. Rujukan Teori

Untuk menyusun dokumen perencanaan yang baik, dibutuhkan beberapa acuan teoritis yang dapat membantu dalam melakukan analisis data, merumuskan rekomendasi kebijakan dan menarik kesimpulan. Adapun teori yang digunakan dalam kajian ini diantaranya adalah Pembangunan Peternakan daerah Kepulauan, Perencanaan Pembangunan, Kebijakan Publik, Aspek-Aspek dalam Pembangunan Peternakan Sapi perah.

BAB III. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pada bagian ini ditampilkan kondisi umum dari wilayah kajian yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun substansi yang dijabarkan pada bagian ini diantaranya adalah Kondisi Geografis, Pemerintahan, Demografi, Kondisi Peternakan, Transportasi, Keuangan Daerah

BAB IV. Kondisi Eksisting Pembangunan Peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pada bagian ini disajikan kondisi kekinian dari pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pertama kali kondisi yang perlu tergambarkan adalah Produk Kebijakan Tentang Pembangunan Peternakan Sapi Perah, hal ini berkaitan dengan dasar hukum yang dapat digunakan dan atau perlu dirumuskan oleh pemerintah untuk

melaksanakan pembangunan peternakan sapi perah. Selanjutnya, gambaran kondisi sarana dan prasarana pembangunan peternakan sapi perah, ketersediaan input produksi peternakan sapi perah, sosial ekonomi masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan sapi perah, kelembagaan pendukung pembangunan peternakan, Permodalan, Pemasaran, dan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB V. Pemetaan Kawasan Pembangunan Peternakan Sapi Perah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Bab ini menyajikan hasil analisis tentang peruntukan kawasan pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah Kawasan Sentra Pembangunan Peternakan Sapi perah, Kawasan Pengembangan Pembangunan Peternakan Sapi perah dan Kawasan Penunjang Pembangunan Peternakan Sapi perah.

BAB VI. Road Map Pencapaian Pembangunan Peternakan Sapi Perah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dibutuhkan road map yang jelas dan benar. Oleh karena itu, pada bagian ini di sajikan tentang Tahap Pencapaian Per Lima Tahun dan Ukuran Keberhasilan.

BAB VII. Kebijakan, Strategi Dan Program Pembangunan Peternakan Sapi perah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Pelaksanaan pembangunan di sebuah wilayah tidak akan terlepas dari kebijakan pemerintah setempat. Untuk itu, pada bagian ini disajikan rekomendasi kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk terlaksananya pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Selanjutnya, juga disajikan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah. Selain itu, pada bagian ini juga ditampilkan beberapa program pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah

BAB VIII. Penutup

Bab ini merupakan bagian terakhir dari dokumen ini yang berisikan kesimpulan dan saran yang dapat digunakan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB II. **RUJUKAN TEORI**

2.1. Pembangunan Peternakan Sapi perah di Indonesia

Pembangunan peternakan merupakan rangkaian kegiatan yang berkesinambungan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat peternak, agar mampu melaksanakan usaha produktif dibidang peternakan secara mandiri. Salah satu bentuk usaha peternakan yang cukup potensial dikembangkan adalah ternak sapi perah. Program pengembangan usaha ternak sapi perah dapat dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya secara optimal dan tepat guna yang disesuaikan dengan keadaan alam, kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, sarana prasarana, teknologi peternakan yang berkembang dan kelembagaan serta kebijakan yang mendukung.

Salah satu komoditi peternakan yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah adalah ternak sapi. Sapi adalah ternak terpenting dari jenis-jenis hewan ternak yang dipelihara manusia sebagai sumber daging, susu, tenaga kerja, dan kebutuhan manusia lainnya.

Sapi perah merupakan ternak yang dibudidayakan dengan tujuan utama untuk menghasilkan suus. Budidaya ternak sapi perah sudah dikenal secara luas oleh masyarakat kita. Jangka waktu pemeliharaan yang relatif singkat dan harga daging yang relatif tinggi memotivasi para pembudidaya untuk terus tetap bersemangat dalam mengembangkan budidaya ternak sapi perah.

Jenis sapi perah sub tropis

1. Friesien Holstein (FH)



Sapi Friesien Holstein asal Belanda.

Frisian Holstein bisa dikatakan sebagai sapi perah paling populer di Dunia. Konon, lebih dari 80% populasi sapi perah di Amerika terdiri dari jenis ini. Demikian juga di Indonesia, sejak jaman kolonial hingga sekarang sebagian besar berupa jenis sapi perah FH. Sapi ini berasal dari propinsi Friesland di Belanda. Walaupun berasal dari daerah subtropis, sapi ini bisa beradaptasi di daerah tropis. Sapi FH Sapi FH memiliki badan yang besar, bobotnya sapi jantannya bisa mencapai 1 ton sedangkan sapi betina bisa mencapai 625 kg. Ukurannya paling besar dibanding jenis sapi lain. Sapi ini memiliki ciri-ciri utama warna kulit hitam putih, tanduknya pendek mengarah ke depan. Produksi susu sapi FH di daerah asalnya bisa mencapai 7245 kg per masa laktasi. Sedangkan di Indonesia 4500-5500 liter per masa laktasi atau setara 10 liter susu per ekor per hari.

Sapi ini berasal dari Pulau Jersey yang terletak diselat antara Inggris dan

*Feasibility Study
Pembangunan*

Kawasan

Sentra

Peternakan

Sapi

perah

Perancis. Nenek moyang sapi ini berasal dari banteng liar yang dikawinkan dengan sapi normandia.

Sapi jersey memiliki warna tubuh yang beragam, mulai dari hitam, merah tua, coklat kekuningan terkadang dibagian tertentu ada warna putihnya. Tanduk sapi ini lebih panjang ketimbang FH dan mengarah ke atas. Bobot sapi perah jenis ini mencapai 625 kg untuk pejantan dan 425 kg untuk yang betina. Produktivitas susunya mencapai 2500 liter per masa laktasi.

3. Sapi Guernsey

Sapi Guernsey berasal dari Pulau Guernsey, Inggris Selatan. Seperti sapi jersey, sapi ini dikembangkan dari sapi liar *Bos Typicus longifrons*. Warna sapi Guernsey coklat kekuningan hingga hampir merah bercampur dengan warna putih. Tanduknya berukuran sedang, arahnya agak condong ke depan.

Bobot sapi jantan bisa mencapai 700 kg dan sapi betina 475 kg. Produksi susunya mencapai 2750 liter per masa laktasi.

4. Sapi Brown Swiss



Sapi Brown Swiss. (Pixabay)

Sesuai namanya sapi ini dikembangkan di Swiss. Sapi ini memiliki warna tubuh keabu-abuan hingga coklat. Perilakunya sangat jinak dan mudah dikendalikan.

Sapi Brown Swiss memiliki badan cukup besar. Sapi jantan bisa mencapai 900 kg dan betina 600 kg. Produktivitas susunya mencapai 3000 kg per masa laktasi.

5. Sapi Ayrshire



Sapi Ayrshire adal Skotlandia. (Wikipedia)

Sapi ini berasal dari Skotlandia warnanya coklat kemerahan belang putih. Ayrshire memiliki tanduk yang cupuk panjang. Tanduk tumbuh tegak lurus ke atas.

Bobot tubuh sapi ayrshire jantan bisa mencapai 725 kg dan betina 550 kg. Produktivitas susu sekitar 3500 liter per masa laktasi.

Jenis sapi perah tropis

1. Sapi Sahiwal

Sahiwal berasal dari daerah Punjab, perbatasan Pakistan dan India. Sapi jenis ini diklaim sebagai jenis sapi perah tropis terbaik.

Sapi Sahiwal memiliki warna yang beraneka ragam, kebanyakan berwarna coklat muda hingga kemerahan. Bulunya halus dan kakinya pendek.

Sapi ini memiliki bobot tubuh sekitar 500-600 kg untuk jantan dan 450 kg untuk betina. Produktivitas susu sekitar 2500-3000 kg per laktasi.

2. Sapi Red Sindhi

Sapi ini berasal dari India, terutama berkembang di daerah-daerah kering dan panas. Kulitnya berwarna merah tua, ukuran tubuhnya kecil.

Sapi jantan dewasa berbobot 450-500 kg dan betina 350 kg. Produktivitas susunya 1700 kg per laktasi.

3. Sapi Gir

Sapi ini masih berasal dari India. Pada umumnya sapi ini berwarna putih, namun ada juga yang berwarna bercak coklat atau hitam dan warna kuning kemerahan.

Berat badan sapi dewasa sekitar 600 kg dan betina 400 kg. Produksi susu mencapai 2000 kg per laktasi.

4. Sapi Ongole

Sapi ini berasal dari India juga, sapi ongol banyak ditemukan di Indonesia namun biasanya diperlakukan sebagai sapi pedaging. Warnanya putih hingga agak gelap. Bobot tubuh pejantan mencapai 500-600 kg dan betina 450-500 kg. Produksi susu relatif sedikit hanya 1250-1500 kg per masa laktasi.

5. Peranakan Frisien Holstein (PFH) atau Sapi Grati

Sapi ini banyak dijumpai di daerah Jawa Timur. Sapi ini persilangan antara pejantan Frisien Holstein (FH) dengan sapi betina lokal dari jenis Jawa dan Madura. Sapi PFH memiliki karakteristik tubuh agak besar dengan daya adaptasi terhadap iklim tropis yang baik. Produktivitas susu sapi ini berkisar 2500-3000 liter per laktasi.

Melihat pentingnya peranan sapi perah dalam pemenuhan pangan di Indonesia, maka pada 8 Juli 1967 ditetapkannya Undang-undang No. 6 Tahun 1967

tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Semenjak dilahirkannya kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia mulai gencar melakukan pembangunan peternakan sapi Perah di seluruh aspek, seperti peningkatan teknologi reproduksi, pakan ternak dan kelembagaan pelaku utamanya.

2.2. Perencanaan Pembangunan Wilayah

Perencanaan wilayah meliputi perencanaan spasial (tata ruang) dan perencanaan aspaspial (pembangunan). Perencanaan tata ruang seharusnya menjadi pedoman dalam mengisi ruang wilayah (space dan place) dengan pembangunan berupa biofisik lingkungan, sosial budaya, politik, dan pembangunan ekonomi. Selain dokumen sebagai output perencanaan dari proses dan kegiatan menyusun perencanaan wilayah, sesungguhnya proses perencanaan itu sendiri adalah bagian penting yang akan menentukan kualitas hasil rencana wilayah. Perencanaan wilayah

merancang pengalokasian, pemanfaatan dan pengelolaan, serta pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi yang ada di wilayah (Noer, 2008; Rustiadi et al., 2011). Ketiga aspek tersebut adalah aspek penting dalam pemikiran pembangunan berkelanjutan. Artinya, perencanaan wilayah yang berwawasan pembangunan berkelanjutan memiliki perhatian dan indikator untuk aspek pembangunan yang sama guna mewujudkan keberlanjutan.

Berikut dijelaskan beberapa pemikiran yang terkait alokasi dan pemanfaatan lahan dalam perkembangan teori perencanaan wilayah:

1. Teori sewa lahan (J.H van Thunen) yang berpendapat bahwa pola produksi pertanian berkaitan dengan tata guna lahan di wilayah pusat kota atau pasar. Hal ini mendorong para petani untuk menyewa lahan yang dekat dengan pasar atau pusat kota
2. Teori Aglomerasi Weber (Teori Lokasi Industri) berpendapat bahwa pemilihan lokasi industri berdasarkan atas prinsip minimisasi biaya, dimana lokasi setiap

industri tergantung kepada biaya transportasi dan biaya tenaga kerja minimum.

3. Teori Central Place (Teori Christaller) berpendapat bahwa penentuan lokasi pemukiman perlu memperhatikan aspek lokasi/lahan, sumber daya pendukung, kelompok masyarakat, sumber daya buatan dan fungsi kegiatan ekonomi sosial dan budaya. Teori Christaller ini menjelaskan bagaimana susunan dari besaran (ukuran) kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah.

4. Perluasan Teori Tempat Sentral Losch
Losch berpendapat bahwa lokasi penjual berpengaruh terhadap jumlah konsumen yang dapat dijaringnya. Makin jauh dari pasar, konsumen enggan membeli karena biaya transportasi (semakin jauh tempat penjualan) semakin mahal. Produsen harus memilih lokasi yang menghasilkan penjualan terbesar. Losch menyarankan lokasi produksi ditempatkan di dekat pasar

5. Teori Kutub Pertumbuhan Perroux
Pertumbuhan atau pembangunan tidak dilakukan di seluruh tata ruang, tetapi terbatas pada beberapa tempat atau lokasi tertentu. Tata ruang diidentifikasikannya sebagai arena atau medan kekuatan yang didalamnya terdapat kutub-kutub atau pusat-pusat.

6. Teori Kutub Pembangunan yang Terlokalisasi (Boudeville)
Teori Boudeville berusaha menjelaskan secara simultan mengenai tata ruang fungsional (secara abstrak) dan tata ruang geografis (secara ril), yaitu menjelaskan perubahan-perubahan pada tata ruang fungsional ke dalam tata ruang geografis.

7. Teori Masukan Transport (Substitusi) dari Walter Isard.
Teori ini menjelaskan pentingnya penghematan urbanisasi, yang merupakan salah satu dampak aglomerasi. Pemikiran Isard lainnya adalah ia telah memasukkan analisis kompleks industri (industrial complex), yakni seperangkat kegiatan pada suatu lokasi spesifik yang mempunyai saling keterhubungan secara teknis dan produksi. Industri-industri akan bekerja lebih optimal bila berkelompok dan bersama-sama secara tata ruang

dibandingkan dengan industri yang melayani sendiri perdagangan untuk daerah yang luas (Isard, 1956).

8. Polarisasi dan Tricking Down menurut Hirschman

Hirschman adalah seorang penganjur teori pertumbuhan tidak seimbang. Proses pertumbuhan tidak seimbang mendorong kemajuan disuatu lokasi (titik) yang menimbulkan tekanan-tekanan, ketegangan- ketegangan, dan dorongan-dorongan kearah perkembangan pada tempat-tempat (titik-titik) berikutnya. Pertumbuhan ekonomi diutamakan pada titik originalnya sebelum menyebar ke tempat lainnya.

9. Teori Daerah/Wilayah Inti

John Friedmann menganalisis aspek-aspek tata ruang, lokasi, serta persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general. Friedmann telah menampilkan teori daerah inti Di sekitar daerah inti terdapat daerah- daerah pinggiran atau periphery regions.

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang menyatakan wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional (RI, 2007). Bappenas menerangkan kawasan adalah wilayah yang berbasis keberagaman fisik dan ekonomi tapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan kawasan adalah usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan saling ketergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi (economic system), masyarakat (social system), dan lingkungan hidup serta sumber daya alamnya (ecosystem). Ada dua pendekatan dalam pengembangan wilayah, yaitu pembangunan dari atas (Development from above) dan pembangunan dari bawah (*Development from bellow*). Konsep pembangunan dari atas paling banyak digunakan baik secara ekonomis maupun

Feasibility Study
Pembangunan

Kawasan

Sentra

Peternakan

Sapi

perah

praktek dengan tujuan membangun sektor-sektor utama (terpilih) pada lokasi tertentu untuk mencapai kemajuan pada seluruh wilayah. Konsep pembangunan dari bawah adalah suatu proses pembangunan yang menyeluruh dari berbagai kesempatan yang ada untuk individu, kelompok sosial dan kelompok masyarakat secara teritorial pada skala menengah dan kecil, memobilisasi sepenuhnya kemampuan dan sumber daya yang ada untuk memperoleh keuntungan bersama dalam ekonomi, sosial dan politik (Ma'arif, 2000). Dengan kajian ini maka pembangunan dari bawah juga dapat diimplementasikan karena keberadaan lahan sangat terkait dengan status kepemilikan yang ditentukan oleh hukum sosial dan budaya masyarakatnya.

2.3. Kawasan Sentra Pembangunan Peternakan

Kawasan merupakan suatu area di permukaan bumi yang relatif homogen dan berbeda dengan sekelilingnya berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kawasan dalam konteks ini adalah lingkungan yang berubah, di dalamnya hubungan sosial direkayasa atau daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu.

kawasan merupakan wilayah yang batasannya bersifat fungsional sering dipergunakan terminologi lain yang lebih spesifik.

Konsep kawasan adalah wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi, tetapi memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, kawasan dapat dipahami sebagai wilayah yang memiliki fungsi tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya melalui kegiatan ekonomi, sektor dan produk unggulannya.

2.4. Kebijakan Publik

Berbagai sudut pandang yang digunakan oleh beberapa ahli mendefinisikan kebijakan. Kebijakan merupakan seperangkat aksi ataupun rencana yang memiliki tujuan politik. Kebijakan adalah suatu tindakan untuk memaknai dan

menyusun basis rasional dalam menetapkan melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu tindakan. Umumnya, kata kebijakan digunakan untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan organisasi ataupun privat.

Kebijakan juga dapat dipahami sebagai sebuah tindakan yang memiliki pola, memiliki arah pada tujuan tertentu dan tidak hanya berupa keputusan untuk melaksanakan sesuatu. Kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilaksanakan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor ataupun pemerintah pada suatu lingkungan tertentu untuk mengatasi permasalahan dan mencapai tujuan.

Menurut Agustino (2016) kebijakan merupakan tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan, nilai tertentu serta berdampak baik untuk masyarakat luas. Selain itu, beberapa para ahli lainnya seperti Friedrich; Eulau & Prewitt dalam Agustino (2016) mendefenisikan kebijakan sebagai upaya yang seringkali berkaitan dengan tindakan untuk mewujudkan tujuan.

Beberapa para ahli kebijakan telah merumuskan tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan, diantaranya menurut langkah-langkah dalam proses merumuskan kebijakan, yaitu:

- 1) Penyusunan Agenda → para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik.
- 2) Formulasi Kebijakan → Para pejabat merumuskan alternative kebijakan untuk mengatasi masalah.
- 3) Adopsi Kebijakan → Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga, atau keputusan peradilan.
- 4) Implementasi kebijakan → kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
- 5) Penilaian Kebijakan → Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah :

1. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
2. Adanya pengaruh kebiasaan lama
3. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
4. Adanya pengaruh dari kelompok luar
5. Adanya pengaruh keadaan masa lalu

2.5. Aspek-Aspek dalam Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah

Pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah yang dilaksanakan di Indonesia, memiliki beberapa isu strategis yang melatar belakangi tindakan pemerintah, diantaranya adalah:

- a) Impor daging sapi dan sapi bakalan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini masih cukup tinggi.
- b) Luas dan produktivitas lahan sumber pakan cenderung menurun dan belum terdapat kawasan yang jelas untuk pengembangan ternak sapi.
- c) Produksi ternak sapi perah nasional sebagian besar masih berasal dari usaha peternakan rakyat. Pencirian dari peternakan rakyat tersebut diantaranya adalah skala pemeliharaan 2-5 ekor per rumah tangga ternak, dilakukan secara individu, penyediaan pakan terbatas, merupakan usaha sampingan dan belum berorientasi bisnis.
- d) Belum banyak produk kebijakan yang dapat membantu berkembangnya usaha ternak sapi perah rakyat.

Untuk itu, perlu tindakan yang inovatif dari pemerintah supaya pembangunan peternakan dapat tercapai dengan baik.

Sehubungan dengan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian, konsep pembangunan kawasan peternakan sapi perah perlu syarat pokok dan syarat pelancar yang mesti terpenuhi supaya tujuan pembangunan peternakan dapat tercapai dengan baik. Adapun syarat pokok yang perlu ada, diantaranya adalah:

- a) Adanya pasar untuk produk ternak sapi perah.
- b) Adanya teknologi yang terus berkembang untuk pembangunan kawasan peternakan sapi perah.
- c) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.
- d) Terdapat perangsang (insentif) untuk peternak rakyat supaya mereka dapat berproduksi lebih maksimal.
- e) Tersedianya infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai untuk kelancaran aksesibilitas dalam menjalankan usaha ternak sapi perah.

Selanjutnya, aspek pelancar yang dibutuhkan untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan kawasan peternakan, diantaranya adalah:

- a) Pendidikan Pembangunan yang lebih dikenal dengan penyuluhan peternakan.

- b) Adanya ketersediaan kredit produksi yang tidak memberatkan peternakan.
- c) Terdapat kelompok tani ternak yang dapat mengorganisasikan tindakan peternak dalam menjalankan usaha.
- d) Adanya perbaikan dan perluasan lahan yang dibutuhkan untuk perandangan dan hijauan pakan ternak serta lapangan pengembalaan.
- e) Adanya perencanaan pembangunan yang baik disusun oleh pemerintah sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah.

Selain aspek-aspek di atas, perlu juga dipertimbangkan beberapa aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu proyek pembangunan, hal ini dinyatakan oleh Gittinger (1986), diantaranya adalah:

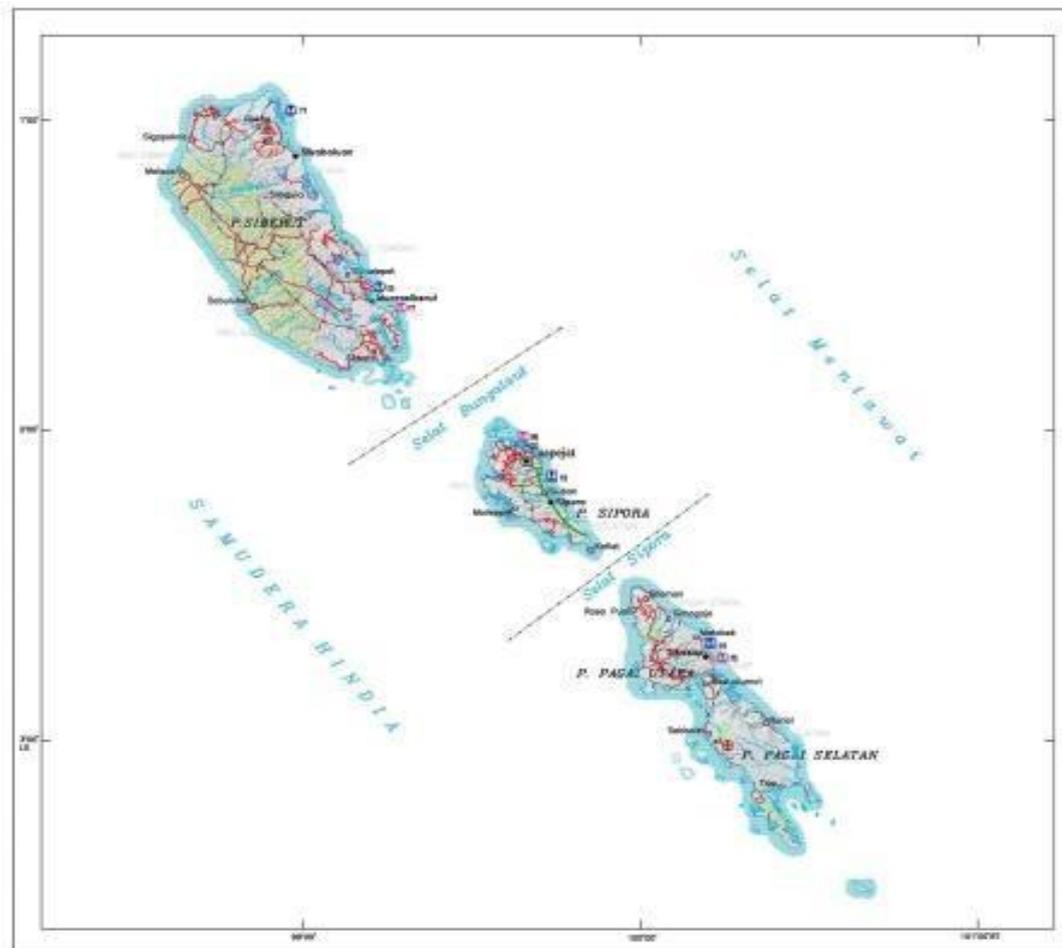
1. **Aspek Teknis**, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan penyediaan input dan output dari barang dan jasa yang akan digunakan serta dihasilkan di dalam suatu proyek.
2. **Aspek Institusional – Organisasi – Manajerial**, yaitu hal-hal yang berkenaan dengan pertimbangan mengenai sesuai tidaknya proyek tersebut dengan pola sosial budaya masyarakat setempat.
Apakah proyek mempertimbangkan gangguan yang akan dirasakan oleh petani-petani yang terbiasa dengan pola lama? Jika ya, ketentuan apa yang telah dibuat.
3. **Aspek kelembagaan:** membahas masalah hubungan kerjasama antara pelaksanaan proyek dengan pemerintah daerah setempat.
4. **Aspek komersial:** membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cara mendapatkan input yang diperlukan dan bagaimana cara memasarkan output yang akan dihasilkan oleh proyek.
5. **Aspek finansial:** membahas masalah cara untuk memperoleh modal/dana yang diperlukan, serta bagaimana proyek dapat mengembalikan dana yang telah diperolehnya (dalam bentuk kredit).
6. **Aspek ekonomis** dilakukan untuk melihat apakah proyek yang akan dilaksanakan akan dapat memberi manfaat yang menguntungkan

kepada masyarakat secara keseluruhan.

BAB III.
GAMBARAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

3.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu dari wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat yang berada terpisah dari Pulau Sumatera (Lihat Gambar 3.1). Posisi geografisnya berada pada $0^{\circ}55'00''$ – $3^{\circ}21'00''$ Lintang Selatan dan $98^{\circ}35'00''$ – $100^{\circ}32'00''$ Bujur Timur dengan luas wilayah tercatat $6.011,35 \text{ km}^2$ dan garis pantai sepanjang $1.402,66 \text{ km}$. Batas sebelah utara adalah Selat Siberut, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Mentawai, serta sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.



Gambar 2.1. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Mentawai

Letak geografis masing-masing kecamatan yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terlihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.1. Letak Geografis Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Kecamatan	Lintang Selatan	Bujur Timur
	(1)	(2)	(3)
1.	Pagai Selatan	2 ⁰ 49'04" - 3 ⁰ 21'00" LS	100 ⁰ 07'01" - 100 ⁰ 32'00" BT
2.	Sikakap	2 ⁰ 37'2" - 3 ⁰ 55'04" LS	100 ⁰ 00'00" - 100 ⁰ 16'12" BT
3.	Pagai Utara	2 ⁰ 30'00" - 2 ⁰ 51'36" LS	99 ⁰ 57'00" - 100 ⁰ 09'36" BT
4.	Sipora Selatan	2 ⁰ 06'00" - 2 ⁰ 24'36" LS	99 ⁰ 36'00" - 99 ⁰ 52'12" BT
5.	Sipora Utara	1 ⁰ 57'00" - 21 ⁰ 18'00" LS	98 ⁰ 30'00" - 99 ⁰ 42'00" BT
6.	Siberut Selatan	1 ⁰ 19'48" - 1 ⁰ 42'00" LS	98 ⁰ 48'00" - 99 ⁰ 18'00" BT
7.	Siberut Barat Daya	1 ⁰ 27'36" - 1 ⁰ 57'00" LS	98 ⁰ 45'00" - 99 ⁰ 19'48" BT
8.	Siberut Tengah	1 ⁰ 15'00" - 1 ⁰ 33'00" LS	98 ⁰ 54'00" - 99 ⁰ 12'00" BT
9.	Siberut Utara	0 ⁰ 54'00" - 1 ⁰ 27'00" LS	98 ⁰ 06'00" - 99 ⁰ 06'00" BT
10.	Siberut Barat	0 ⁰ 55'00" - 1 ⁰ 34'12" LS	98 ⁰ 35'00" - 98 ⁰ 59'24" BT

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017.

Sedangkan batas wilayah masing-masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terlihat melalui data Tabel 3.2 berikut.

Tabel 2.1. Batas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Batas Daerah			
		Utara	Timur	Selatan	Barat
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pagai Selatan	Sikakap	Selat Mentawai	Samudra Hindia	Samudra Hindia
2.	Sikakap	Pagai Utara	Selat Mentawai	Pagai Selatan	Samudra Hindia
3.	Pagai Utara	Selat Sipora	Selat Mentawai	Sikakap	Samudra Hindia
4.	Sipora Selatan	Sipora Utara	Selat Mentawai	Selat Sipora	Samudra Hindia
5.	Sipora Utara	Selat Bunga Laut	Selat Mentawai	Sipora Selatan	Samudra Hindia
6.	Siberut Selatan	Siberut Tengah	Selat Mentawai	Siberut Barat Daya	Samudra Hindia
7.	Siberut Barat Daya	Siberut Selatan	Selat Mentawai	Selat Bunga Laut	Samudra Hindia
8.	Siberut Tengah	Siberut Utara	Selat Mentawai	Siberut Selatan	Samudra Hindia
9.	Siberut Utara	Selat Siberut	Selat Mentawai	Siberut Tengah	Samudra Hindia
10.	Siberut Barat	Selat Siberut	Sib. Utara & Tengah	Siberut Barat Daya	Samudra Hindia

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri atas 4 pulau besar ditambah pulau-pulau kecil (252 buah). Keempat pulau besar ini adalah Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai secara keseluruhan adalah 601.135 Ha. Wilayah terluas berada pada Kecamatan Siberut Barat dan terkecil adalah Kecamatan Sipora Selatan. Sedangkan ketinggiannya dari permukaan laut rata-rata 2 meter di atas permukaan laut (dpl). Lebih rincinya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2. Luas Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan dan Tinggi Ibu Kota Kecamatan dari Permukaan Laut

No	Kecamatan	Luas Kecamatan (Ha)	Ibu Kota Kecamatan	DPL (meter)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pagai Selatan	90.108	Bulasat	-
2.	Sikakap	27.845	Taikako	2
3.	Pagai Utara	34.202	Saumanganya	-
4.	Sipora Selatan	26.847	Sioban	2
5.	Sipora Utara	38.308	Sido Makmur	-
6.	Siberut Selatan	50.833	Muara Siberut	2
7.	Siberut Barat Daya	64.908	Pakasiat Taileleu	-
8.	Siberut Tengah	73.987	Saibi Samukop	-
9.	Siberut Utara	81.611	Muara Sikabaluan	2
10.	Siberut Barat	112.486	Simalegi	-
Kepulauan Mentawai		601.135	Tuapejat	2

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017.

Pada umumnya masyarakat Mentawai memanfaatkan sungai-sungai sebagai jalur transportasi yang dapat menghubungkan satu desa ke desa lainnya. Adapun jumlah sungai yang ada di kabupaten ini sebanyak 19 sungai yang tersebar di 4 pulau besarnya. Sungai terpanjang terdapat di Kecamatan Siberut Barat yaitu Sungai Simalegi (40 Km), sedangkan sungai terpendek terdapat di Kecamatan Pagai Selatan yaitu Sungai Makalo (5Km).

Satu hal yang paling mencolok di daerah ini yaitu jarak tempuh dari Ibu Kota Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten dan Ibu Kota Provinsi yang relatif jauh. Kecamatan yang memiliki jarak tempuh terjauh adalah Kecamatan Simalegi berjarak 194 Km menuju Ibu Kota Kabupaten

Kepulauan Mentawai dan 283 Km menuju Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang paling dekat adalah Kecamatan Sidomakmur berjarak 7 Km menuju Ibu Kota Kabupaten dan 160 Km menuju Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Jarak Tempuh Ibu Kota Kecamatan menuju Ibu Kota Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Ibu Kota Provinsi Sumatera Barat.

No	Ibu Kota Kecamatan / Kabupaten	Jarak ke Ibu Kota (Km)	
		Kabupaten (Tuapeijat)	Provinsi (Padang)
	(1)	(2)	(3)
1.	Bulasat	154	238
2.	Taikako	112	196
3.	Saumanganya	74	234
4.	Sioban	26	170
5.	Sido Makmur	7	160
6.	Muara Siberut	65	146
7.	Pasakiat Teileleu	70	212
8.	Saibi Samukop	110	191
9.	Muara Sikabalan	128	150
10.	Simalegi	194	283

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017.

Lahan yang ada di daerah ini dipergunakan berdasarkan beberapa peruntukan, seperti permukiman, lahan pertanian, kehutanan dan beberapa peruntukan lainnya. Lebih lengkapnya dapat dilihat data pada Tabel 3.5.

Tabel 2.4. Penggunaan Lahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)

Feasibility Study
Pembangunan *Kawasan* *Sentra* *Peternakan* *Sapi* *perah*

		Pemungkim an	Sawa h	Tegal an	Kebun Campur an	Perkebun an
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pagai Selatan	304	8	0	6.454	2.316
2.	Sikakap	453	193	0	3.781	1.097
3.	Pagai Utara	171	14	0	2.232	2.475
4.	Sipora Selatan	478	39	0	7.585	822
5.	Sipora Utara	424	126	49	6.608	4.437
6.	Siberut Selatan	326	190	47	3.294	144
7.	Sib. Barat Daya	240	6	0	5.300	1.936
8.	Sib. Tengah	142	14	19	7.416	1.000
9.	Sib. Utara	414	121	16	15.600	753
10.	Sib. Barat	144	29	0	10.236	2.144
	Kepulauan Mentawai	3.096	740	131	68.506	17.124

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017.

Lanjutan Tabel 2.5.

No	Kecamatan	Luas Lahan (Ha)				
		Hutan	Semak Belukar	Kolam	Hutan Sejenis & lain- lain	Jumlah
		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Pagai Selatan	68.584	8.202	0	4.240	90.108
2.	Sikakap	17.298	3.751	0	1.272	27.845
3.	Pagai Utara	27.258	864	0	1.188	34.202
4.	Sipora Selatan	16.055	1.420	0	448	26.847
5.	Sipora Utara	19.168	5.352	0	2.144	38.308
6.	Siberut Selatan	41.323	5.165	0	344	50.833

7.	Siberut Barat Daya	48.940	7.294	200	992	64.908
8.	Siberut Tengah	61.830	2.466	0	0	73.987
9.	Siberut Utara	58.623	5.464	0	620	81.611
10.	Siberut Barat	97.222	2.711	0	0	112.486
Kepulauan Mentawai		456.301	42.689	200	11.248	601.135

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017.

3.2. Pemerintahan

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki 10 kecamatan, 43 desa dan 341 dusun. Desa terbanyak (7 desa) dimiliki oleh Kecamatan Sipora Selatan sedangkan dusun terbanyak dimiliki oleh Kecamatan Pagai Selatan yaitu 49 Dusun. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6. Jumlah Kecamatan, Ibu Kota Kecamatan, Desa dan Dusun di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Desa	Dusun
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pagai Selatan	Malakopa	4	49
2.	Sikakap	Sikakap	3	44
3.	Pagai Utara	Saumanganya	3	30
4.	Sipora Selatan	Sioban	7	43
5.	Sipora Utara	Sido Makmur	6	29
6.	Siberut Selatan	Muara Siberut	5	34
7.	Siberut Barat Daya	Taileleu	3	25
8.	Siberut Tengah	Saibi Samukop	3	32
9.	Siberut Utara	Muara Sikabalu	6	26
10.	Siberut Barat	Simalegi Betaet	3	29
Jumlah			43	341

Sumber: BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017

Pada era otonomi daerah, sistem pemerintahan lebih mengarah pada prinsip partisipatif yang dicirikan dengan pengambilan keputusan pembangunan berdasarkan musyawarah mufakat. Kondisi tersebut dapat terlihat dari keberadaan lembaga permusyawaratan desa yang dimiliki oleh setiap desa. Jumlah lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai sebanyak 43 buah dengan anggota rata-rata 5 s.d 11 orang per lembaga.

Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai secara operasionalnya dijalani oleh aparatur pemerintah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 2.664 orang. Mereka tersebar pada 35 unit kerja termasuk Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan tempat dilaksanakannya kegiatan penyusunan dokumen Feasibility Study Pembangunan Peternakan Sapi perah. Sedangkan jumlah anggota legislatif yang bernaung dalam lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebanyak 20 orang.

3.3. Demografi

Saat ini jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang tercatat dalam data BPS sebanyak 86.981 jiwa. Penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Sipora Utara sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Pagai Utara. Melalui Tabel 3.7 berikut dapat terlihat kondisi demografi daerah ini secara rinci.

Tabel 2.7. Luas Daerah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pagai Selatan	901,08	9,677	10
2.	Sikakap	278,45	10,146	36
3.	Pagai Utara	342,02	5,797	16

*Feasibility Study
Pembangunan*

Kawasan

Sentra

Peternakan

Sapi

perah

4.	Sipora Selatan	268,47	9,204	34
5.	Sipora Utara	383,08	12,294	32
6.	Siberut Selatan	508,33	9,880	19
7.	Siberut Barat Daya	649,08	6,767	10
8.	Siberut Tengah	739,87	6,828	9
9.	Siberut Utara	816,11	9,045	11
10	Siberut Barat	1.124,86	7,343	6
Total		6.011,35	86,981	14

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017

Data di atas memperlihatkan bahwa Kecamatan Sikakap memiliki kepadatan paling tinggi sedangkan Kecamatan Siberut Barat berada pada kepadatan terendah. Bila dilihat dari sisi jenis kelamin, penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45.210 jiwa sedangkan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 41.771 jiwa. Distribusi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut.

Tabel 2.8. Banyaknya Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Ratio Jenis Kelamin
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pagai Selatan	5.084	4.593	9.677	110,69
2.	Sikakap	5.272	4.874	10.146	108,17
3.	Pagai Utara	3.005	2.792	5.797	107,63
4.	Sipora Selatan	4.767	4.437	9.204	107,44
5.	Sipora Utara	6.390	5.904	12.294	108,23
6.	Siberut Selatan	5.112	4.768	9.880	107,21
7.	Siberut Barat Daya	3.527	3.240	6.767	108,86
8.	Siberut Tengah	3.540	3.288	6.828	107,66
9.	Siberut Utara	4.687	4.358	9.045	107,55
10.	Siberut Barat	3.826	3.517	7.343	108,79
TOTAL		45.210	41.771	86.981	108,23

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017

Bila dilihat dari jumlah rumah tangga yang ada di kabupaten ini sebanyak 20.764 rumah tangga. Kecamatan Sikakap memiliki jumlah rumah tangga terbanyak yaitu 2.899 rumah tangga yang tersebar disetiap Km nya sebanyak 10 rumah tangga. Jumlah rumah tangga paling sedikit terdapat di Kecamatan Pagai Utara yaitu 1.494 rumah tangga yang tersebar disetiap Km nya sebanyak 4 rumah tangga. Bahkan di Kecamatan Siberut Barat setiap 1 Km nya hanya ditempati oleh 1 rumah tangga. Kondisi ini memperlihatkan bahwa daerah ini belum mengalami kepadatan yang dapat menjadi aspek penghalang dalam menjalankan usaha peternakan sapi.

Data demografi ini juga dibutuhkan untuk melihat kondisi regerasi yang ada di wilayah ini. Untuk itu perlu juga ditampilkan kondisi kependudukan berdasarkan pengelompokkan usianya. Melalui tabel berikut dapat terlihat sebaran penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan kelompok usia.

Tabel 2.9. Presentase Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

No	Kecamatan	Dewasa			Anak –Anak		
		Laki-laki	Pere mpua n	Jumla h	Laki-laki	Pere mpua n	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Pagai Selatan	3.160	2.769	5.929	1.788	1.695	3.483
2.	Sikakap	3.322	3.104	6.426	1.798	1.626	3.424
3.	Pagai Utara	1.800	1.627	3.427	1.085	1.052	2.137
4.	Sipora Selatan	3.036	2.790	5.826	1.536	1.478	3.014
5.	Sipora Utara	4.187	3.845	8.032	2.071	2.003	4.074
6.	Siberut Selatan	3.098	2.887	5.985	1.898	1.814	3.712
7.	Siberut Barat Daya	2.104	1.886	3.990	1.366	1.317	2.683
8.	Siberut Tengah	1.974	1.826	3.773	1.500	1.415	2.915
9.	Siberut Utara	2.843	2.650	5.493	1.713	1.591	3.304
10.	Siberut Barat	2.208	1.957	4.165	1.554	1.510	3.064
TOTAL		27.705	25.341	53.046	16.309	15.501	31.810

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017

Berdasarkan kelompok usia di atas dapat dikelompokkan kembali penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan lapangan usaha pekerjaannya seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Persentase Penduduk Usia Dewasa Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Lapangan Usaha	Jenis kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+ Perempuan
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan,Perburuan dan Perikanan	73,18	76,59	74,57
2.	Industri	1,81	0,23	1,17
3.	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	7,81	9,01	8,29
4.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perseorangan	12,07	12,90	12,41
5.	Lainya	5,13	1,27	3,56
	Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017.

3.4. Kondisi Peternakan

Komoditi peternakan yang diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai cukup beragam. Kenyataan yang terlihat dari data statistik, ternak terbanyak di daerah ini adalah ternak babi dengan populasi sebanyak 30.489 ekor. Meskipun demikian adanya, ternak-ternak lain selain sapi perah juga diusahakan oleh masyarakat seperti sapi perah dengan populasi sebanyak 1.290 ekor, ternak kerbau sebanyak 115 ekor, ternak kambing sebanyak 865 ekor dan ternak unggas sebanyak 60.448 ayam buras, ayam ras 925, ayam ras pedaging sebanyak 1.494 ekor dan ternak itik sebanyak 7.079 ekor dan tidak ada ternak Perah(BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017).

3.5. Kondisi Transportasi

Sarana dan prasarana transportasi menjadi aspek yang dapat membantu kelancaran kegiatan pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jalur transportasi yang ada di daerah ini terdiri dari dua macam yaitu jalur transportasi darat dan laut. Kondisi sarana jalan yang tersedia di daerah ini adalah 1.230,69 Km tersebar di 10 kecamatannya dengan status jalan negara, jalan provinsi dan jalan kabupaten. Rincian kondisi jalan di setiap kecamatannya dapat dilihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 2.11. Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Kecamatan	Pemerintah			Panjang Total (Km)
		Jalan negara (Km)	Jalan provinsi (Km)	Jalan kabupaten (Km)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pagai Selatan	-	-	332,20	332,20
2.	Sikakap	-	-	61	61
3.	Pagai Utara	-	-	86	86
4.	Sipora Selatan	53,39	-	93,40	146,79
5.	Sipora Utara	36,10	11	94,10	141,20
6.	Siberut Selatan	-	-	129,70	129,70
7.	Siberut Barat Daya	-	-	53,80	53,80
8.	Siberut Tengah	-	-	53	53
9.	Siberut Utara	-	-	154	154
10.	Siberut Barat	-	-	73	73
TOTAL		89,49	11	1.130,20	1.230,69

Sumber : BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017

Daerah ini juga memiliki sarana dan prasana untuk transportasi laut seperti pelabuhan sebanyak 24 buah. Pulau Pagai memiliki 9 buah pelabuhan, Pulau Sipora memiliki pelabuhan sebanyak 4 buah dan Pulau Siberut memiliki 11 buah pelabuhan. Keseluruhan jalur transportasi ini menjadi penopang aktifitas kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sedangkan jalur transportasi tradisional yang masih digunakan sampai saat ini adalah jalan setapak dan aliran sungai yang menghubungkan beberapa desa.

3.6. Keuangan Daerah

Berbicara pembangunan peternakan sapi perah tidak terlepas dari kondisi keuangan daerah. Oleh karenanya perlu ditampilkan kondisi keuangan yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pendapatan daerah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 41.948.183.104,-, dana perimbangan sebesar Rp. 787.055.445.564,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 81.033.148.886,-. Sehingga total pendapatan daerah ini sebanyak Rp. 910.036.777.554,- sedangkan total belanja daerah sebanyak Rp. 990.803.893.254. Kondisi ini memperlihatkan daerah ini mengalami defisit sebanyak Rp. 80.767.115.691,- (BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017).

Defisitnya kondisi keuang daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menggambarkan bahwa kegiatan pembangunan peternakan sapi perah tidak bisa mengandalkan keuangan daerah. Pemerintah daerah harus mensinergikan program pembangunannya dengan program pembangunan pemerintah pusat, sehingga permasalahan ini dapat terminimalisir. Pemerintah juga bisa menggunakan pendekatan investor untuk mengatasi keterbatasan keuangan daerahnya untuk membantu pembangunan peternakan sapi perah.

Dari sisi pengeluaran penduduk untuk daging sebesar Rp. 12.973,- rata-rata per kapita, sedangkan total pengeluaran per kapita bahan makanan masyarakat

Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp.417.513,71(BPS Kab.Kep.Mentawai, 2017). Kondisi ini membuktikan bahwa daya beli masyarakat terhadap komoditi daging tidak terlalu baik. Tentunya ini juga menjadi tantangan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB IV

KONDISI EKSISTING PEMBANGUNAN PETERNAKAN SAPI PERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

4.1. Produk Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terkait Pembangunan Peternakan Sapi perah.

Kebijakan pemerintah dengan pembangunan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, hal ini dikarenakan pembangunan sebagai wadah beroperasinya suatu kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Sementara itu, kebijakan yang menunjuk pada kerangka kerja pembangunan, memberikan pedoman pada pengimplementasian tujuan- tujuan pembangunan kedalam beragam program dan proyek. Kebijakan merupakan suatu ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya. Menurut Carl Friedrich dalam Agustino (2008) kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Pada saat pemerintah mengambil sebuah kebijakan, maka biasanya akan diikuti oleh produk kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini, produk kebijakan yang dimaksudkan mengacu kepada produk kebijakan pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga, diantaranya adalah:

- 1) Produk kebijakan yang menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan peternakan, seperti Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- 2) Produk kebijakan yang menjadi penjabar pelaksana seperti Peraturan Bupati atau surat keputusan bersama Gubernur Sumatera Barat dengan Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 3) Produk kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan Kepala Dinas, Pedum/Juklak/Juknis yang dikeluarkan oleh OPD terkait pembangunan peternakan sapi perah.

Keseluruhan produk kebijakan di atas dibutuhkan pemerintah sebagai dasar hukum dalam menjalankan pembangunan peternakan sapi perah terutama untuk melancarkan pencapaian tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Adapun kondisi produk kebijakan terkait pembangunan peternakan sapi perah yang ada saat ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 3.1. Kondisi Produk Kebijakan yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Terkait dengan Pembangunan Peternakan Sapi perah.

No	Tipologi Produk Kebijakan	Tanggapan Informan		Bentuk Produk Kebijakan yang Dimiliki Pemerintah
		ada	Tdk ada	
1.	Kebijakan Mendasar	-	√	Perda No..... Tahun.....Tentang.....
2.	Kebijakan Penjabar	-	√	Perbub No..... Tahun... Tentang
3.	Kebijakan Mengatur Pelaksanaan	-	√	Juklak/Juknis Tentang.....
				Pedum tentang.....

Sumber: Sintesis Data Sekunder dan Wawancara Informan, 2018.

Mengacu pada data yang tercantum dalam tabel di atas, terlihat bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki produk kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan peternakan sapi perah. Kondisi ini tentunya tidak bisa dianggap sederhana, hal ini dikarenakan produk kebijakan merupakan landasan atau dasar hukum yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan sentra peternakan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kedepannya, untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai mestinya merumuskan dan menerbitkan beberapa produk kebijakan. Produk kebijakan yang paling mendasar dalam kegiatan ini dapat saja berupa PERDA yang menetapkan suatu lokasi menjadi Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah. Produk kebijakan tersebut dapat saja melekat pada PERDA yang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (RTRWD) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Melalui produk kebijakan tersebut, pemerintah nantinya memiliki dasar hukum yang kuat dalam menetapkan wilayah sebagai kawasan sentra peternakan sapi perah.

4.2. Sarana dan Prasarana Pembangunan Peternakan Sapi Perah yang Tersedia di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Sarana dan prasaran pembangunan peternakan merupakan kebutuhan aspek teknis yang mesti tersedia untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan kawasan sentra

peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Feasibility Study
Pembangunan *Kawasan* *Sentra* *Peternakan* *Sapi* *perah*

Adapun sarana dan prasarana yang perlu teridentifikasi untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah di wilayah ini, diantaranya adalah:

- 1) Prasarana untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah, seperti:
 - Lahan: lahan hijauan pakan ternak, lahan pengembalaan, lahan perkandangan dan lahan perkantoran;
 - Perkantoran/Bangunan: Kantor UPTD Pembibitan dan Budidaya Sapi perah ; hasil olahan susu , Pos Kesehatan Hewan; Kandang sapi perah milik pemerintah;
 - Jalan
 - sumber dan ketersediaan air
 - sumber energi
- 2) sarana untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah, seperti:
 - peralatan milik pemerintah: Alat/mesin peternakan dan kesehatan hewan; Bibit ; Pakan; Obat hewan, strow stresing.

Melalui Tabel 4.2 berikut ini dapat terlihat kondisi sarana dan prasarana pembangunan peternakan sapi perah nantinya yang ada saat ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Tabel 3.2. Kondisi Sarana dan Prasarana Pembangunan
Peternakan Sapi perah dan Perah di Kabupaten Kepulauan
Mentawai**

No	Aspek Teknis Pembangunan Peternakan Sapi perah	Komponen	Kondisi		Jumlah	Lokasi / status / Jenis	
			Ada	Tidak Ada			
1.	Prasarana	a)Lahan:					
		- Lahan hijauan pakan ternak		√			
		- Lahan penggembalaan		√			
		- Lahan perkandangan		√			
		- Lahan perkantoran: UPTD Pembibitan & Budidaya;		√			
		Pos IB;		√			
		Pos Keswan;		√			
		Pasar Ternak;		√			
		RPH		√			
		Kandang		√			
		b)Perkantoran/ bangunan pendukung pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah:					
		- UPTD Pembibitan & Budidaya		√			
		- Pos IB		√			
		- Pos Keswan		√			
		- Pasar Ternak		√			
		- RPH		√			
		- Kandang		√			
		c)Jalan :					
		- Jalan menuju UPTD Pembibitan & Budidaya		√			
		- Jalan menuju Pos IB		√			
		- Jalan menuju Pos Keswan		√			
		- Jalan menuju Pasar Ternak		√			
		- Jalan menuju RPH		√			
- Jalan menuju Kandang		√					
d) Sumber dan ketersediaan air:							

		- di calon lokasi/lahan yang akan dijadikan kawasan sentra peternakan sapi perah.		√		
		- Di perkantoran pendukung pembangunan peternakan.		√		
		e) Sumber energi:				
		- di calon lokasi/lahan yang akan dijadikan kawasan sentra peternakan sapi perah.		√		
		- Di perkantoran pendukung pembangunan peternakan.		√		
2.	Sarana	a) Peralatan Perkandangan		√		
		b) Peralatan Kesehatan Hewan		√		
		c) Peralatan Pengelolaan pakan ternak		√		
		d) Peralatan reproduksi ternak		√		
		e) Peralatan kontrol produksi / berat badan ternak.		√		
		f) Transportasi		√		
		g) Peralatan pengolahan limbah		√		

Sumber: Sintesis Data Sekunder dan Wawancara Informan, 2018.

Data di atas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai belum memiliki sarana dan prasarana pembangunan peternakan sapi perah. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan peternakan melalui sentra kawasan, perlu tindakan khusus dan serius dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membangun seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

4.3. Kondisi Ketersediaan Input Produksi Peternakan Sapi Perah.

Dalam hal ini, kawasan peternakan dipahami sebagai wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan. Oleh karenanya, dibutuhkan pengetahuan tentang ketersediaan input produksi di wilayah yang akan menjadi kawasan sentra peternakan sapi perah. Adapun input produksi yang paling utama dibutuhkan oleh sebuah kawasan peternakan sapi perah, diantaranya adalah:

- 1) **Sumber Daya Manusia (Rumah Tangga Peternak)**
- 2) **Lahan**, baik untuk lahan padang penggembalaan/hijauan makan ternak (HMT), lahan perkandangan, lahan pengolahan limbah ternak, dan lahan perkantoran untuk pusat pelayanan dari pemerintah.
- 3) **Pakan Ternak**, dapat berasal dari hijauan yang dibudidayakan, hijauan yang tumbuh alami, limbah usaha tani tanaman pangan, limbah perkebunan, limbah perladangan, dan pakan tambahan (konsentrat, dedak, dll).
- 4) **Sapi Betina Produktif dan Bibit Ternak Sapi perah**, baik yang berasal dari ternak sapi hasil persilangan.
- 5) **Teknologi**, baik teknologi yang berkaitan dengan pakan ternak, perkandangan, reproduksi, dan kesehatan hewan.

Kelima input produksi di atas semestinya dimiliki oleh calon lokasi yang akan dijadikan sentra kawasan peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan hasil wawancara dan data sekunder yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, kondisi input produksi peternakan sapi perah yang ada saat ini dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 3.3. Kondisi Input Produksi Peternakan Sapi perah yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Aspek Input Produksi	Penilaian Kualitatif		
		Cukup	Kurang	Tidak Ada
1.	SDM (Rumah Tangga Peternak)	-		√
2.	Lahan	√	-	-
3.	Pakan ternak unggul	-	√	-
4.	Sapi Betina Produktif dan Bibit Ternak Sapi perah	-	-	√
5.	Teknologi	-	-	√

Sumber: Sintesis Data Sekunder dan Wawancara Informan, 2018.

Berdasarkan data di atas, terlihat beberapa aspek input produksi yang dimiliki oleh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai berada dalam kondisi cukup, seperti lahan. Hal ini dikarenakan wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih banyak yang dapat diberdayakan oleh pemerintah dan masyarakat tempatan. Lahan-lahan tersebut dapat saja memiliki status kepemilikan pemerintah, lahan adat ataupun lahan milik masyarakat. Namun demikian, perlu kiranya pemerintah menetapkan luas lahan yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi kawasan sentra peternakan sapi perah.

Akan tetapi, input produksi lainnya seperti pakan ternak sapi perah berada pada kondisi kurang cukup. Hal ini dikarenakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai belum ada yang memelihara ternak sapi sebagai salah satu sumber usaha keluarga mereka.

Bahkan beberapa input produksi berada pada kondisi tidak ada dan teknologi pendukung usaha tani ternak sapi perah.. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai berkeinginan menjadi salah satu daerah penghasil sapi perah melalui pembangunan kawasan peternakan sapi perah.

Begitu juga dengan ketersediaan teknologi yang dibutuhkan untuk pembangunan peternakan sapi perah melalui pembangunan kawasannya belum tersedia . Paling tidak pemerintah membutuhkan teknologi pakan ternak, teknologi reproduksi ternak, dan teknologi kesehatan hewan untuk menunjang tercapainya

tujuan pembangunan ini.

4.4. Gambaran Sosial Ekonomi Masyarakat Calon Pelaku Utama (peternak sapi perah) dalam Melaksanakan Pembangunan Peternakan Sapi perah.

Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu tolak ukur yang dapat membantu pemerintah menetapkan kawasan sentra peternakan sapi perah. Hal ini dikarenakan status sosial ekonomi masyarakat mempengaruhi mereka dalam mengambil keputusan terhadap program pemerintah. Selain itu status sosial ekonomi masyarakat merupakan posisi yang ditempati individu atau keluarga yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang umum berlaku tentang kepemilikan kultural, pendapatan efektif, pemilikan barang dan partisipasi dalam aktifitas kelompok dari komunitasnya.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah tinggi rendahnya prestise yang dimiliki seseorang berdasarkan kedudukan yang dipegangnya dalam suatu masyarakat berdasarkan pada pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya atau keadaan yang menggambarkan posisi atau kedudukan suatu keluarga masyarakat berdasarkan kepemilikan materi (Kaare, 1989). Adapun kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di calon kawasan sentra peternakan sapi perah dapat terlihat melalui Tabel 4.4.

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi di atas terlihat bahwa calon pelaku utama pembangunan peternakan sapi perah atau calon peternak yang ada di calon lokasi pembangunan kawasan peternakan sapi perah, masih membutuhkan tindakan rekayasa sosial dari pemerintah. Melalui kegiatan rekayasa sosial tersebut diharapkan pemerintah dapat memberdayakan masyarakat sekitar kawasan untuk menekuni usaha tani ternak sapi perah. Hal ini didasari dengan kondisi sosial ekonomi yang dirasa belum mengenal baik kegiatan usahatani ternak sapi perah.

Tabel 3.4. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Calon Pelaku Utama Pembangunan Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Aspek Sosial Ekonomi	Aktualisasi Kondisi Sosial Ekonomi
----	----------------------	------------------------------------

SOSIAL		
1.	Rata-rata usia masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan	Produktif (17 thn s.d 56 thn)
2.	Rata-rata jenis kelamin masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan	Seimbang antara laki-laki dengan perempuan
3.	Rata-rata Tingkat Pendidikan Masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan.	Tamat SD s.d SMP
4.	Rata-rata anggota/tanggung jawab keluarga calon pelaku utama pembangunan peternakan	> 3 orang
5.	Pengalaman beternak sapi perah yang dimiliki oleh Masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan	Belum pernah ada
6.	Budaya beternak sapi selain Perah yang biasanya dijalani oleh Masyarakat calon pelaku utama	Dilepas pada lahan pengembalaan atau melaksanakan dengan sistem

Peternakan		tradisional
EKONOMI		
1.	Rata-rata pekerjaan utama Masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan	Non usaha tani dan petani ladang
2.	Rata-rata pekerjaan sampingan Masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan.	Usaha tani ternak sapi perah dan Non Usahatani
3.	Rata-rata pendapatan per bulan Masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan.	> 1 jt s.d 2,5 jt / bulan
4.	Pola pembagian kegiatan ekonomi keluarga	Ayah dan Ibu sebagai sumber utama ekonomi keluarga

Sumber: Sintesis Data Sekunder dan Wawancara Informan, 2018.

Untuk usia rata-rata yang dimiliki oleh calon pelaku utama, berada pada kondisi yang cukup baik. Hal ini dikarenakan mayoritas dari mereka berada pada usia produktif yaitu 17 thn s.d 56 thn. Keuntungan yang ditimbulkan dari kondisi usia produktif tersebut adalah cara bekerja dan pola pikir mereka dapat dikembangkan kearah yang lebih produktif. Selain itu, usia produktif umumnya

mampu menerima dengan cepat inovasi- inovasi ataupun ide-ide baru yang di anjurkan oleh pemerintah.

Dilihat dari segi jenis kelamin, masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan berada pada kondisi seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembagian gender yang ada dapat saling mengisi kelemahannya masing-masing dalam menjalankan usaha tani ternak selain sapi perah. Pada saat pekerjaan yang membutuhkan tenaga fisik yang lebih banyak dapat diatasi oleh pihak laki- laki, dan pada saat pekerjaan yang tidak membutuhkan tenaga fisik dapat dipenuhi oleh pihak perempuan. Artinya, dari segi jenis kelamin tidak terlalu mengalami kendala yang cukup berarti.

Selanjutnya kondisi tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar calon kawasan sentra peternakan selain sapi perah. Mayoritas dari mereka berada pada kondisi pendidikan yang masih rendah yaitu tamat SD dan SMP. Pendidikan adalah suatu usaha untuk menghasilkan perubahan-perubahan pada perilaku manusia. Perubahan perilaku yang ditimbulkan oleh proses pendidikan dapat dilihat melalui (1) perubahan dalam hal pengetahuan, (2) perubahan dalam keterampilan atau kebiasaan dalam melakukan sesuatu, dan (3) perubahan dalam sikap mental terhadap segala sesuatu yang dirasakan. Pendidikan merupakan proses pembentukan watak seseorang sehingga memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku. Pada saat kondisi pendidikan masyarakat calon pelaku utama berada pada kondisi rendah, maka pemerintah nantinya mengalami sedikit kendala dalam melakukan peningkatan kompetensi dan pengetahuan mereka. Hal ini paling dirasakan pada saat usaha tani ternak sapi diarahkan pada konsep modernisasi.

Dilihat dari jumlah tanggungan keluarga, mayoritas dari masyarakat memiliki tanggungan > 3 orang per rumah tangga. Kondisi ini sebenarnya menjadi kekuatan pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau melakukan pengembangan usaha keluarga melalui usaha ternak sapi perah. Jumlah tanggungan keluarga juga menggambarkan jumlah anggota keluarga sebuah rumah

tangga yang dapat memberikan gambaran ketersediaan tenaga kerja, tanggungan hidup keluarga dan sarana pendapantan keluarga (Mulyono, 2012). Jumlah tanggungan keluarga dapat mempengaruhi semangat dan kreatifitas kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya (Kadir, 2012). Namun demikian, jumlah tanggungan keluarga yang terlalu banyak ditambah dengan kondisinya yang belum produktif dapat menjadi penyebab timbulnya kemiskinan di tingkat rumah tangga masyarakat.

Peternak sapi perah berada pada kondisi masih minim yaitu 1 tahun bahkan ada yang belum pernah berpengalaman. Kondisi ini sebenarnya tidak semua dialami oleh masyarakat, ada juga sebagian kecil yang telah berpengalaman di atas 4 tahun. Minimnya pengalaman masyarakat membutuhkan tindakan khusus dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan kompetensinya dalam hal usaha tani ternak sapi perah nantinya .

Mayoritas dari mereka adalah petani kebun, petani ladang dan menjalankan usaha non pertanian. Namun demikian, ada dari mereka yang menjadikan usaha tani ternak selain sapi perah menjadi pekerjaan sampingan. Tentunya kondisi ini belum memenuhi harapan dan kebutuhan untuk kelancaran pembangunan kawasan sentra peternakan. Oleh karenanya, perlu juga usaha ekstra dari pemerintah untuk memberdayakan masyarakat untuk mau menjalankan usaha tani ternak sapi Perah guna menunjang tercapainya tujuan program pemerintah.

Rata-rata pendapatan per bulan Masyarakat calon pelaku utama pembangunan peternakan berada pada angka 1 juta s.d 2,5 juta rupiah per bulan. Hal ini menjadi kekuatan dan kelemahan dalam menjalankan pengembangan usaha tani ternak sapi perah tingkat rumah tangga peternak. Sebagai kekuatan, pemerintah dapat menjadikan usaha tani ternak sapi Perah sebagai alternatif sumber mata pencaharian masyarakat untuk menambah pendapatan keluarga. Sedangkan dinyatakan sebagai kelemahan, masyarakat yang berfikir instan untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga lebih memilih usaha yang dapat menghasilkan uang lebih cepat. Sedangkan usaha tani ternak sapi perah nantinya tidak membutuhkan waktu karena langsung menghasilkan susu dan olahannya yang bisa menghasilkan uang.

Nilai positif dari kondisi ekonomi masyarakat yang didapatkan adalah pola pembagian kegiatan ekonomi keluarga. Umumnya mereka menjalankan usaha ekonomi keluarga didominasi oleh ayah dan ibu. Hal ini memperlihatkan bahwa, kerjasama dalam sebuah rumah tangga telah terbangun untuk pemenuhan perekonomian keluarganya.

4.5. Kelembagaan Pendukung Pembangunan Peternakan.

Pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa dilakukan oleh 1 intitusi pemerintah semata. Untuk dapat mencapai tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan, dibutuhkan beberapa kelembagaan pendukung yang berasal dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi dan bahkan dari pihak swasta. Adapun kelembagaan pendukung yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5. Kelembagaan Pendukung yang Dibutuhkan untuk Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Status Kelembagan	Tugas/Fungsi	Bentuk Kelembagaan
1.	Pemerintah	Pengambil kebijakan/regulasi, memfasilitasi, dan pemberdayaan.	a) UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.
			b) UPTD/Pos Resproduksi Ternak
			c) UPTD/Pos Kesehatan Hewan
			d) Rumah Hasil suus
			e) Rumah olahan suusu
			f) Pos Penyuluhan Peternakan Desa
			g) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sektor peternakan.
2.	Masyarakat (peternak)	Pelaku utama dan patner pemerintah.	a) Kelompoktani Ternak / Kelompok Agribisnis Peternakan.
			b) Gabungan Kelompoktani Ternak.
			c) Lembaga Ekonomi Peternakan
3.	Swasta	Pasokan teknologi,	a) Perusahaan pemasok teknologi usahatani ternak sapi perah.

		modal/investasi dan pemasaran.	b) Perusahaan pemasok modal usahatani ternak sapi perah.
			c) Perusahaan pemasaran ternak sapi perah.
4.	Perguruan Tinggi	Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi/inovasi, dan pemberdayaan.	a) Lembaga Penelitain
			b) Lembaga pengabdian masyarakat
			c) Lembaga Sertifikasi produk peternakan sapi

Sumber: Dilolah dari berbagai jurnal penelitian, 2018.

Keseluruhan kelembagaan di atas dibutuhkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk membantu tercapainya tujuan pembangunan peternakan sapi perah melalui kawasan sentra peternakan sapi perah. Oleh karena itu, perlu produk kebijakan yang dapat memayungi untuk keberadaan kelembagaan tersebut.

4.6. Sumber Permodalan/Pendanaan Program.

Dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah, dibutuhkan pendanaan program yang sangat besar. Oleh karena itu, perlu juga dalam kajian ini memunculkan permodalan yang dapat digunakan untuk pelaksanaan pengembangan kawasan peternakan sapi perah. Adapun sumber permodalan yang dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam menjalankan program ini, dapat terlihat melalui tabel 4.6.

Pada kenyataannya, modal pembangunan dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian diantaranya adalah modal sumber daya alam, modal sumber daya manusia, modal sosial dan budaya, seta modal modal material. Dalam hal ini modal pembangunan kawasan sentra peternakan lebih ditonjolkan pada modal material. Hal ini dikarenakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai diasumsikan membutuhkan pendanaan yang cukup besar.

Tabel 3.6. Sumber Permodalan Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Sumber Permodalan	Bentuk Permodalan
----	-------------------	-------------------

1.	Pemerintah Pusat	APBN dalam bentuk hibah atau bantuan dari beberapa kementerian, seperti: Kementerian Pertanian; Kementerian Keuangan; Kementerian Sosial; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak; Kementerian PUPR; dan
2.	Pemerintah Provinsi	APBD Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk hibah atau bantuan pembangunan peternakan.
3.	Pemerintah Daerah	APBD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam bentuk hibah atau bantuan pembangunan peternakan
4.	Swasta	Investasi atau penanaman modal
5.	Swakelola	Investasi atau penanaman modal dari masyarakat, dan atau aparatur pemerintahan Kabupaten

Sumber: Interpretasi dari berbagai sumber, 2020

Keseluruhan sumber modal di atas diharapkan dapat membantu permodalan material untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Modal material lebih menonjolkan modal dalam bentuk uang atau anggaran dana untuk melakukan kegiatan ini.

4.7. Pemasaran Susu Sapi perah

Pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah nantinya akan menghasilkan komoditi peternakan s u s u sapi Perah yang diusahakan oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat sekitar kawasan. Tentunya muara dari kegiatan ini adalah pemasaran produk sapi perah yang telah dihasilkan oleh kawasan ini nantinya.

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial dimana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Pemasaran adalah proses dimana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan tujuan untuk menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Pemasaran adalah sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan,

menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan pelanggan yang ada kepada pembeli potensial.

Mengacu pada konsep pemasaran di atas, maka pembahasan tentang pemasaran dalam bagian ini lebih ditujukan pada target pasar, rantai atau saluran pemasaran yang dapat digunakan, serta kelembagaan pemasaran yang dapat terlibat dalam kegiatan pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten kepulauan Mentawai. Ketiga komponen pemasaran tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah mencari alternatif dasar terkait dengan kegiatan pemasaran ternak sapi perah.

Dalam menetapkan sasaran pasar (target pasar), pemerintah terlebih dulu harus melakukan segmentasi pasar, dengan cara mengelompokkan konsumen (pembeli) ke dalam kelompok dengan ciri-ciri (sifat) yang hampir sama. Penentuan target pasar sangat penting karena pemerintah dan masyarakat peternak tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi, sehingga pelaku pasar harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayaninya sebagai target pasar.

Target pasar untuk ternak sapi perah dipahami sebagai sebuah kelompok konsumen yang menjadi sasaran agar mau membeli produk yang di pasarkannya oleh pelaku pembangunan peternakan sapi perah. Target pasar juga dapat diartikan sebagai sekelompok pembeli yang memiliki sifat-sifat sama yang membuat pasar berdiri sendiri. Untuk menentukan target pasar, kita harus menilai secara hati-hati segmen mana yang akan dimasuki dan berapa ukuran segmen nya. Adapun segmentasi pasar untuk komoditi peternakan sapi perah di Kabupaten

Kepulauan Mentawai dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7. Segmentasi Pasar Ternak Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Pembagian Segmentasi Pasar	Kelompok Konsumen
----	----------------------------	-------------------

1.	Pasar Berdasarkan Geografis	Pasar peternakan sapi perah dapat dibagi kedalam beberapa wilayah, diantaranya: a) Pemasaran dalam Kabupaten Kepulauan Mentawai. b) Pemasaran ke seluruh wilayah administrasi Provinsi Sumatera Barat, seperti: Kota Padang dan daerah lainnya. c) Pemasaran ke luar Provinsi Sumatera Barat, seperti: Jambi, Riau, Bengkulu, dan daerah di Pulau Jawa.
2.	Pasar Berdasarkan Demografi	Pasar ternak sapi Perah dikelompokkan menjadi: a) Pemasaran untuk masyarakat usia produktif. b) Pemasaran untuk masyarakat golongan ekonomi menengah keatas. c) Pemasaran untuk masyarakat berpendidikan menengah ke atas.
3.	Pasar berdasarkan Sociocultural	Pasar ternak sapi dapat ditujukan kepada masyarakat yang telah terbiasa mengkonsumsi daging sapi, masyarakat muslim (kebutuhan acara keagamaan), dan masyarakat non muslim
4.	Pasar berdasarkan benefit (manfaat)	Adapun segmen pasar yang dapat dituju diantaranya: a) Perhotelan dan turunannya b) Restoran dan turunannya c) Perusahaan makanan berbasis bahan baku daging sapi

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2018.

Untuk dapat menjalankan segmentasi pasar yang tercantum dalam tabel di atas, dibutuhkan rantai atau saluran pemasaran yang memang efektif.

Hal ini dikarenakan saluran pemasaran yang digunakan nantinya dapat mempengaruhi pendapatan atau keuntungan dari pelaku utama peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Adapun kelembagaan pemasaran komoditi ternak

Olahan sapi perah di daerah ini, diantaranya adalah:

- 1) Peternak (baik yang bersifat Rumah Tangga Peternak, Kelompok tani Ternak, dan pelaku usaha agribisnis peternakan).
- 2) Pedagang besar adalah pedagang yang selain melakukan proses konsentrasi (pengumpulan) komoditi dari pedagang-pedagang pengumpul, juga melakukan proses distribusi (penyebaran) keagen penjualan ataupun pengecer.
- 3) Pedagang kecil
- 4) Pengumpul
- 5) Pengecer
- 6) Konsumen

4.8. Kerjasama antar Lembaga dalam Pembangunan Kawasan Sentra Peternakana Sapi perah

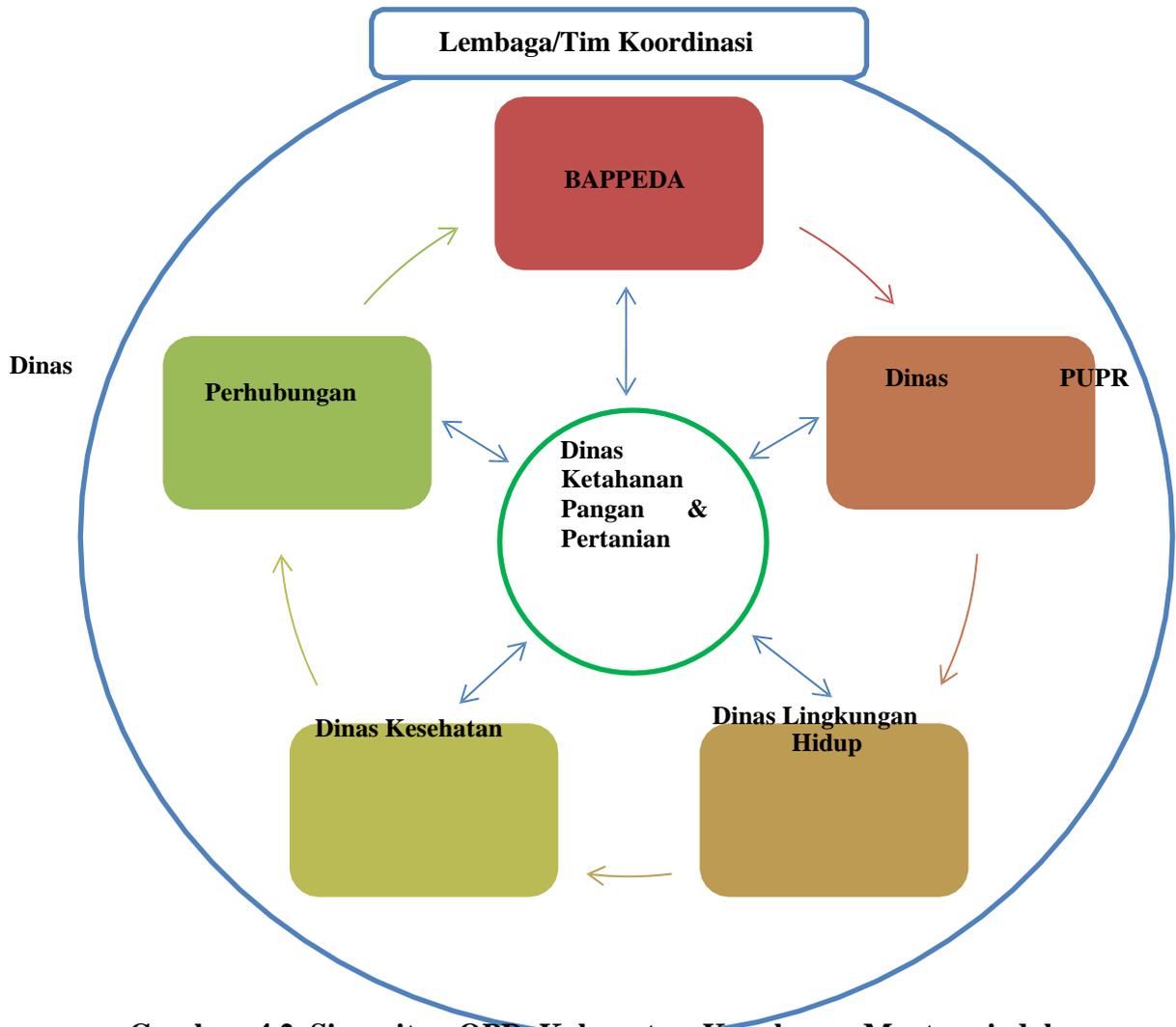
Pada prinsipnya, pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak bisa berjalan dengan baik, jika tidak ada terciptanya kerjasama atau sinergitas antara lembaga pemerintahan secara baik dan harmonis. Ada tiga komponen yang harus bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan masyarakat. Ketiga-tiga komponen ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Sehingga, pada saat ketiganya tidak bisa bersinergi dalam mencapai tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah, maka dapat dipastikan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan program dan kegiatan.

Orientasi utama kelembagaan pemerintah adalah untuk melayani rakyat (dan sekaligus penguasa), tergantung kepada corak pemerintahannya. Pemerintahan yang demokratis sangat melayani rakyatnya sedangkan yang bercorak otokratis mengandung pengabdian kepada penguasanya. Sedangkan orientasi perguruan tinggi adalah

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk membantu pembangunan kawasan peternakan sapi Perah. Pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah berorientasi pada keuntungan usaha. Selanjutnya orientasi masyarakat pada umumnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangganya. Dengan demikian, pada saat mereka semua tidak bersatu, maka pencapaian tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah tidak bisa dicapai secara efektif. Seyogyanya sinergitas tersebut tidak hanya diciptakan untuk ke empat stakeholder tersebut, sinergitas harus tercipta juga antara pelaku yang berada dalam kelompok besar tersebut.

Namun demikian, dalam pembahasan ini lebih difokuskan pada kerjasama atau sinergi antara instansi atau OPD yang berada dalam pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini dikarenakan pelaku dan pengambil kebijakan terkait program dan kegiatan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan peternakan sapi perah adalah OPD terkait yang ada dalam pemerintahan. Ada beberapa OPD yang harus disinergikan, sehingga tujuan dari pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah dapat terwujud dengan efektif. Adapun simulasi sinergitas antar OPD yang terdapat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dapat terlihat pada gambar 4.2.

Prinsip dasar yang mesti diusung dalam mewujudkan kerjasama antar OPD terkait adalah bersama-sama atau bersatu guna tercapainya tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Selain itu, peran aktif pimpinan daerah untuk menciptakan sinergitas tersebut sangat diperlukan. Dimana pimpinan daerah memiliki kekuatan untuk menegaskan pada setiap OPD untuk mau bekerjasama dalam mencapai tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah.



Gambar 4.2 Sinergitas OPD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Pembangunan Sentra Kawasan Peternakan Sapi perah

Sinergitas antara OPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai mesti terbangun dengan baik. Untuk menciptakan kerjasama yang baik antara OPD terkait, dibutuhkan strategi yang efektif. Berdasarkan gambar di atas, dapat dijabarkan beberapa strategi untuk menciptakan sinergitas/kerjasama antara OPD dalam pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun strategi yang dimaksudkan adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, membentuk lembaga / tim koordinasi pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Lembaga/tim ini harus memiliki kekuatan hukum yang jelas dalam menjalankan tugasnya.
2. Anggota yang terdapat dalam lembaga/tim koordinasi adalah perwakilan seluruh OPD yang berkompeten dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Penetapan peran, hak dan kewajiban pada masing-masing anggota harus jelas dan disepakati oleh setiap pimpinan OPD yang terlibat dalam membantu pencapaian tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Pemilihan pelaku dalam lembaga/tim koordinasi berlandaskan kompetensi, seperti kemampuannya berkomunikasi, menganalisa masalah dan membangun jaringan yang positif.
5. Aparatur pemerintahan yang diposisikan sebagai tim koordinasi, mendapatkan reward dalam setiap keberhasilan yang dicapainya.

BAB V

PEMETAAN KAWASAN PEMBANGUNAN PETERNAKAN SAPI PERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kawasan sentra peternakan sapi perah dipahami sebagai wilayah yang berbasis pada keberagaman fisik dan ekonomi, namun demikian keseluruhannya memiliki hubungan erat dan saling mendukung satu sama lain secara fungsional demi mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pada sektor peternakan sapi perah.

Mengacu pada Permentan No. 50 / Permentan /OT.140 / 8/ 2012, Kawasan Peternakan harus memiliki padang penggembalaan atau hijauan makanan ternak, serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak - perkebunan, ternak - tanaman pangan, ternak-hortikultura. Untuk menetapkan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai mesti ditata sedemikian rupa, agar kawasan ini nantinya dapat menjadi: 1) lokasinya sesuai dengan agroekosistem dan alokasi sesuai dengan tata ruang wilayah; 2) berbasis komoditas ternak unggulan/strategis; 3) memiliki infrastruktur yang baik (pasar, jalan, sumber air, dll); 4) didukung dengan ketersediaan teknologi dan jaringan kelembagaan yang berakses ke hulu dan hilir serta berpeluang dikembangkan.

Program pengembangan kawasan sentra peternakan sapi perah menjadi sangat penting untuk segera diimplementasikan, karena kawasan peternakan yang seharusnya menjadi titik sentral semua aktifitas pengembangan budidaya peternakan yang dilakukan oleh peternak. Dalam kajian ini, kawasan sentra peternakan sapi perah merupakan lokasi baru yang memiliki sumber daya alam, sesuai agroekosistemnya dan membutuhkan pelayanan yang terhubung secara fungsional. Melalui pembahasan berikut ini dapat diketahui indikator dan wilayah atau lokasi kawasan sentra peternakan sapi perah yang dapat dibangun oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5.1. Penentuan Lokasi Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.

Pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah merupakan usaha yang

*Feasibility Study
Pembangunan*

Kawasan

Sentra

Peternakan

Sapi

perah

dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk mengembangkan dan meningkatkan saling ketergantungan dan interaksi antara sistem ekonomi, manusia atau masyarakat, dan lingkungan hidup beserta sumber daya alam yang ada di dalamnya (Mahi, 2016). Untuk menentukan lokasi kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

1) Mencari lahan sasaran lokasi kawasan sentra peternakan sapi perah, pertimbangan yang digunakan diantaranya, lahan kosong/terlantar/ tidur yang dimiliki oleh masyarakat atau pemerintah dan berdekatan dengan usaha tani/kawasan pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memiliki luas 5 Ha s.d 1000 Ha (Bappenas, 2004). Adapun standar teknis untuk lahan yang dibutuhkan, diantaranya adalah:

a) Lahan Kebun Hijauan Makan Ternak (HMT):

- Kemiringan lahan maksimum 40%
- Tersedia air yang cukup di lahan
- 1 kelompok tani mengelola \pm 10 Ha kebun HMT
- Luas 1 hamparan HMT \pm 1 Ha
- Lahan bukan areal persawahan
- Lokasi disesuaikan dengan RTRW
- Lokasi telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau yang membidangi peternakan melalui SK Penetapan Lokasi.
- Lokasi memiliki status kepemilikan yang jelas
- Lokasi mudah dijangkau dan bebas banjir.
- Lokasi memiliki aksesibilitas yang baik.
- Lokasi bebas banjir.
- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program sejenis.
- Lokasi berada dalam wilayah kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

b) Lahan Padang Pengembalaan:

- Kemiringan lahan untuk padang pengembalaan maksimal 15%.
- 1 kelompok tani diupayakan minimal mengelola 10 Ha.

- Luas padang penggembalaan diupayakan minimal 5 Ha per hamparan.
- Memiliki ketersediaan air yang cukup.
- Lokasi disesuaikan dengan RTRW.
- Lokasi telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau yang membidangi peternakan melalui SK Penetapan Lokasi.
- Lokasi memiliki status kepemilikan yang jelas
- Lokasi mudah dijangkau dan bebas banjir.
- Lokasi memiliki aksesibilitas yang baik.
- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program sejenis.
- Diutamakan lokasi yang memiliki vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang, hutan ringan.
- Kesesuaian lahan untuk tumbuhan hijauan makanan ternak.
- Lokasi berada dalam wilayah kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

- 2) Mengidentifikasi ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang ada dalam atau sekitar calon kawasan, dalam hal ini jumlah Rumah Tangga Peternak sapi perah dan petani.
- 3) Mengidentifikasi dukungan sumber daya alam (SDA) yang dapat mendukung aktifitas pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah, khususnya yang dapat menjadi sumber pakan ternak dan air.
- 4) Ketersediaan infrastruktur, parasarana dan sarana pendukung, seperti jalan, RPH, Pos Keswan, Pos IB, Pasar Ternak, Pelabuhan.

5.2. Pemetaan Wilayah Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.

Hasil penetapan wilayah atau lokasi untuk kawasan sentra peternakan sapi perah ini mesti terakomodir kedalam RTRWD Kabupaten Kepulauan Mentawai. Secara berurutan melalui gambar berikut dapat terlihat peta kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Keseluruhan calon lokasi kawasan sentra peternakan sapi perah yang telah dipetakan melalui beberapa gambar di atas tentunya membutuhkan keseriusan dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunannya. Dikarenakan saat ini dalam lokasi calon kawasan masih minim sekali dukungan prasarana dan sarana pembangunan peternakan sapi perah, perlu kiranya pemerintah terlebih dahulu

*Feasibility Study
Pembangunan*

Kawasan

Sentra

Peternakan

Sapi

perah



memfokuskan dalam hal pembangunan fisik untuk menunjang terbangunnya kawasan sentra peternakan sapi perah. Selain itu, perlu juga disiapkan kuantitas dan kualitas SDM peternak yang nantinya menjadi pelaku utama dalam kawasan tersebut.

Untuk pengelolaan kawasan sentra pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dibutuhkan pola tersendiri yang memang sesuai dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu, sebaiknya pola pengelolaan kawasan khususnya untuk lahan, dapat dilakukan oleh pemerintah melalui 2 (dua) pendekatan yaitu:

- 1) Kawasan yang sepenuhnya dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 2) Kawasan yang dikelola bekerjasama dengan masyarakat dalam dan sekitar kawasan sentra peternakan sapi perah.

Kedua pola pengelolaan di atas bertujuan untuk mengatasi status kepemilikan lahan yang berada dalam kawasan sentra peternakan sapi perah. Untuk lahan-lahan yang dimiliki oleh pemerintah, dapat dikelola penuh oleh internal pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pada saat kawasan tersebut bersinggungan dengan lahan milik masyarakat atau adat, dapat dilakukan kerjasama dengan masyarakat.

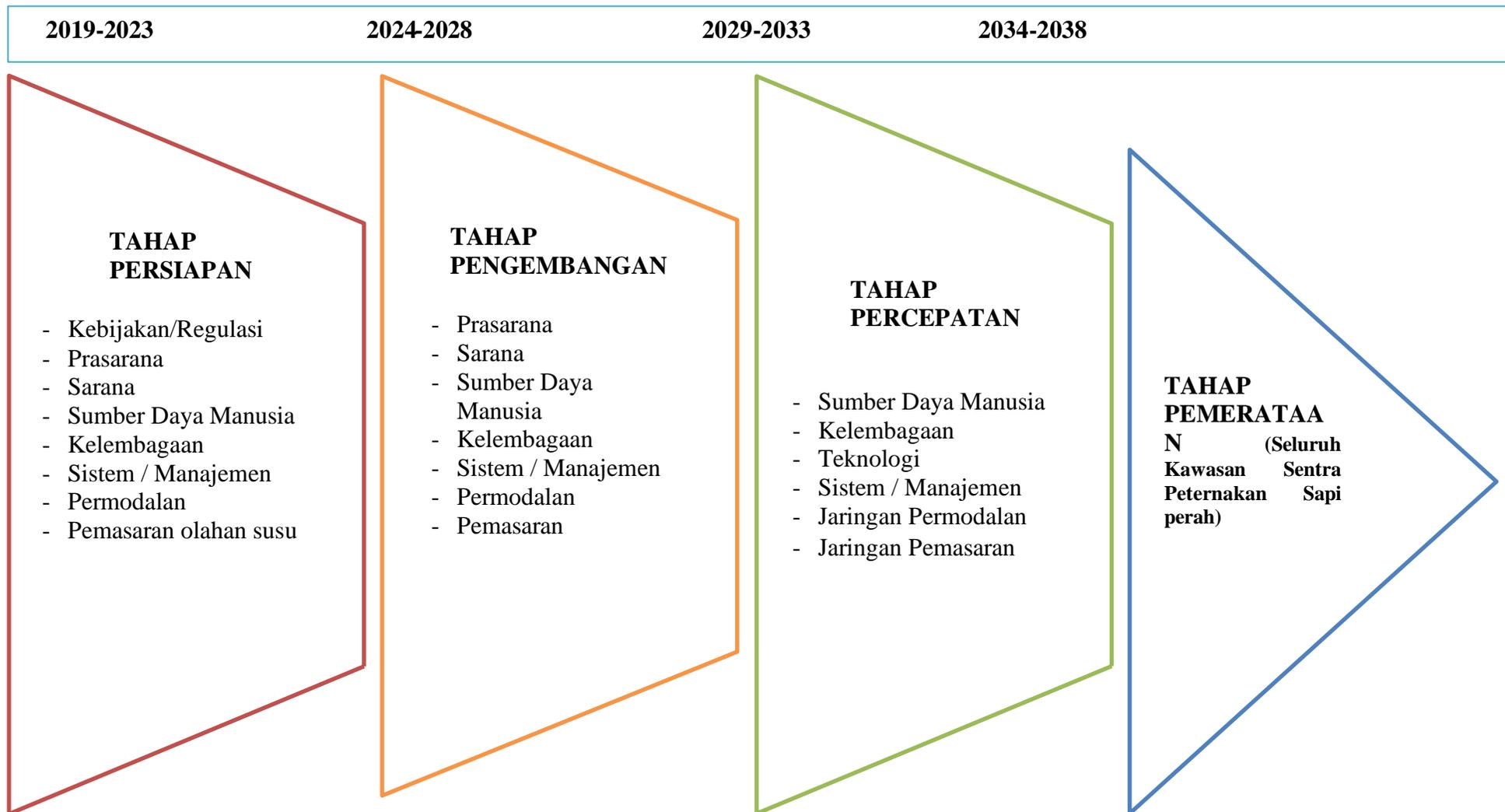
BAB VI.
ROAD MAP PEMBANGUNAN KAWASAN SENTRA PETERNAKAN SAPI PERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Untuk mewujudkan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dibutuhkan satu acuan untuk menjadi arah program dan kegiatan yang nantinya diselenggarakan oleh pemerintah. Road map pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah disusun secara komprehensif berdasarkan pendekatan kerangka kerja logis. Road Map ini nantinya menjadi peta penentu atau petunjuk arah untuk pemerintah dalam menjalankan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun Road Map yang digunakan dalam kegiatan ini dapat terlihat pada gambar 6.1.

Road Map untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, disusun untuk jangka waktu panjang, yaitu selama 20 tahun kedepan yang terhitung dari tahun 2019 s.d 2038. Untuk dapat terlaksana dengan lebih terarah, maka pelaksanaan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah dapat dikelompokkan menjadi 4 tahapan, diantaranya:

- 1) Tahap Persiapan
- 2) Tahap Pengembangan
- 3) Tahap Percepatan
- 4) Tahap Pemerataan

Untuk lebih jelasnya, melalui gambar berikut ini dapat terlihat alur atau arah yang dapat digunakan dalam pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.



Gambar 6.1. Alur Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai



Mengacu pada Gambar 6.1 di atas, terlihat bahwasannya pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai mesti dimulai dari tahap persiapan. Tahap pertama atau lima tahun pertama yang terhitung dari tahun 2019 s.d 2023 adalah tahapan persiapan. Untuk melaksanakan tahapan pertama ini, sebaiknya pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai memulainya di Pulau Sipora. Hal ini dikarenakan wilayahnya dekat dan mudah diakses serta dikontrol oleh pemerintah daerah. Selain itu, kawasan sentra peternakan sapi perah yang berada dalam Pulau Sipora berdekatan dengan pusat pemerintahan.

Adapun pada tahapan ini pemerintah melakukan persiapan-persiapan yang dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah, diantaranya sebagai berikut:

1) Kebijakan/Regulasi

Pada tahap persiapan ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu mempersiapkan produk-produk kebijakan yang dapat menjadi landasan atau dasar atau payung hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan pembangunan kawasan sentra peternakan. Adapun produk kebijakan yang mesti dihasilkan dalam tahap persiapan ini, diantaranya adalah:

- Produk kebijakan yang bersifat makro, yaitu produk kebijakan yang mendasar. Bentuk dari produk kebijakan ini dapat saja berupa PERDA Kabupaten Kepulauan Mentawai yang mengatur tentang pembangunan peternakan atau PERDA tentang Penetapan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah.
- Produk kebijakan yang bersifat meso, yaitu produk kebijakan yang berfungsi sebagai penjabar pelaksanaan untuk pembangunan peternakan sapi perah atau pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Bentuk produk kebijakan ini seperti Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten

Kepulauan Mentawai atau Surat Edaran Bupati Kabupaten

Kepulauan Mentawai.

- Produk kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, sebagai contohnya keputusan Kepala Dinas, Pedum, Juklak, Jukinis, dll. Seluruh kebijakan tersebut nantinya dapat memudahkan pemerintah daerah dari sisi hukum dan penganggaran dana pelaksanaan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah.

2) Prasarana

Untuk membangun sebuah kawasan sentra peternakan sapi perah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan prasarana yang dapat mendukung tercapainya tujuan program ini. Adapun prasarana yang dibutuhkan diantaranya adalah:

- Lahan

Lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai diantaranya adalah lahan perkantoran, lahan hijauan pakan ternak, lahan penggembalaan, lahan untuk infrastruktur pendukung.

- Infrastruktur

Adapun infrastruktur yang dibutuhkan untuk kegiatan ini diantaranya adalah perkantoran, kandang, jalan, sumber air, sumber energi, dan pasar.

- Penunjang

Dalam hal ini prasarana penunjang yang dibutuhkan diantaranya adalah industri pakan ternak, industri pengolahan daging, obat-obatan/vaksin hewan, Pos Keswan, Pos Olahan hasil susu, dll.

3) Sarana

Pada saat prasarana telah tersedia di sekitar kawasan sentra peternakan sapi perah, selanjutnya pemerintah mestinya melengkapi sarana untuk prasarana

yang telah dibangun. Adapun sarana yang akan disediakan pemerintah dapat menyesuaikan dengan kebutuhan prasarana yang telah dibangun.

4) Sumber Daya Manusia

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah yang efektif, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Dalam hal ini SDM yang disiapkan tidak hanya untuk masyarakat peternakan saja namun juga SDM aparatur pemerintah juga mesti disiapkan untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara baik.

5) Kelembagaan

Kelembagaan yang dimaksudkan di sini merupakan bentuk suatu hubungan dan tatanan antara anggota masyarakat atau organisasi yang melekat, diwadahi dalam suatu jaringan atau organisasi yang dapat menentukan suatu hubungan antara manusia atau organisasi dengan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik atau aturan formal dan non-formal untuk berkerjasama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Mengacu pada pemahaman tersebut, pada tahap persiapan ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai perlu membentuk kelembagaan di dalam pemerintah dan kelembagaan yang berada pada lingkup masyarakat (peternak) untuk membantu menjalankan atau mencapai tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. Sistem / Manajemen

Berbicara pembangunan kawasan sentra peternakan tidak terlepas dari membangun sebuah sistem tata kelola yang baik. Hal ini dikarenakan sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mengelola komponen dan elemen yang terdapat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah dibutuhkan manajemen yang baik.

Adapun manajemen yang dimaksudkan disini adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi atau kelembagaan untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran, dan kegiatan, yang saling bertentangan dari pihak yang punya kepentingan dengan cara bekerja sama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki.

7) Permodalan

Selanjutnya pada tahap persiapan ini juga dibutuhkan kejelasan permodalan dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Modal merupakan komponen terpenting yang dapat menentukan pelaksanaan pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Modal yang dimaksudkan disini adalah segala sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Adapun bentuk modal yang dapat digunakan diantaranya adalah modal material berupa dana/anggaran/uang, modal non material berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal sosial. Adapun sumber modal yang dapat dipersiapkan, bisa berasal dari internal pemerintah (APBD) dan berasal dari eksternal pemerintah seperti APBN, Investor, Bank, dan Hibah Pembangunan.

8) Pemasaran

Muara dari pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah adalah menghasilkan produk akhir berupa susu sapi perah, keju, yougurt, ice cream yang berasal dari susu i. Seluruh produk tersebut mesti dipersiapkan pasarnya sehingga nantinya keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ini benar-benar dapat tercapai dengan baik. Paling tidak, pada tahapan ini telah terbentuk sistem pemasaran, manajemen pemasaran dan sasaran atau target pasar.

Pada saat tahun pelaksanaan untuk tahap persiapan telah tercapai dengan baik, maka pemerintah dapat melanjutkan pada tahap kedua yaitu tahapan pengembangan yaitu tahapan untuk menyempurnakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Dalam hal ini, pemerintah tidak lagi berbicara merumuskan atau melahirkan produk kebijakan untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Pemerintah dapat lebih memfokuskan kegiatan pengembangan untuk Prasarana, Sarana, Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Sistem / Manajemen, Permodalan, Pemasaran.

Untuk tahap berikutnya adalah percepatan dan tahapan pemerataan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini dikarenakan wilayah kawasan yang akan dibangun berada pada 4 pulau besar dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Wilayah percepatan dan pemerataan ini nantinya dapat ditentukan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi yang telah berkembang.

BAB VII.
STRATEGI, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
KAWASAN SENTRA PETERNAKAN SAPI PERAH.

Bagian ketujuh ini menyajikan tiga hal; strategi, kebijakan dan program. Ketiganya dirinci, khususnya untuk pembangunan kawasan peternakan sapi perah tahap persiapan tahun 2019 – 2023. Sesuai dengan uraian bab 6, road map pembangunan. Dari empat tahap, sesi ini memusat pada langkah persiapan. Pola penyajiannya melalui paparan konsep yang lebih teoritis, diikuti fakta pengalaman dari provinsi Sumatera Barat daerah darat. Akhirnya jabaran strategi, kebijakan dan program yang relevan dan cocok dengan tahap pertama (persiapan) pengembangan kawasan peternakan sapi.

Tahap persiapan memuat delapan arah, yaitu; kebijakan/ regulasi; sarana/ prasarana; sumber daya manusia; kelembagaan; sistem / manajemen; permodalan dan pemasaran. Hanya saja pada intinya, tahap ini berfungsi sebagai dasar untuk mendukung kelancaran pengembangan kawasan. Pada tahapan persiapan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, acuan regulasi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan dapat terlihat melalui tabel berikut ini.

Tabel 4.1. Dasar Hukum Perumusan Kebijakan Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai

No	Tingkatan Kebijakan	Produk Kebijakan
1.	Makro	Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

		Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
		Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
		Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
		Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
		Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1977 Tentang Usaha Peternakan.
		Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
		Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Dan /Atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan.
		Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak.
		Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
		Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan.

		Peraturan Pemerintah RI Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
		Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.
2.	Meso	Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.
		Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Budidaya Sapi Perah yang Baik.
		Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian RI Nomo 49 tahun 2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam Wilayah RI.
		Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan.
		Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Upaya Khusus

		Percepatan Peningkatan Populasi Sapi dan Kerbau Bunting.
		Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penyediaan dan peredaran semen beku ternak ruminansia.
		Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pemasukan Sapi Bakalan dan Sapi Indukan ke dalam Wilayah Negara RI.
		Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat di Sektor Pertanian.
		Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Budidaya sapi perah yang baik.
		Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kawasan Sapi perah, Kerbau, Kambing, Sapi perah, Domba, dan Babi Nasional.
		Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119 tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
3.	Mikro	Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 01029 Tahun 2012

		Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan PPID Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
		Pedoman Pembibitan Sapi perah yang Baik (Direktorat Perbibitan Ternak, Kementan, 2014).
		Petunjuk Teknis Teknologi Inovasi Pakan Murah untuk Usaha Pembibitan Sapi perah (Pusat penelitian dan pengembangan peternakan, Deptan 2007).
		Pedoman Teknis Perluasan Areal Peternakan (Direktorat perluasan dan pengelolaan lahan, Kementan 2014).
		Pedoman Teknis Laboratorium Lapangan dan Sekola lapangan Pembibitan dan penggemukan Sapi perah (LL dan SL-PPSP), Pusat Penelitian dan Pengembangan peternakan, Kementan 2015.
		Petunjuk Teknis Perkandangan Sapi perah, Pusat Penelitian dan Pengembangan peternakan, Deptan 2007.

Sumber: Diolah dari <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>, 2018.

Keseluruhan produk kebijakan yang bersifat regulasi di atas dapat digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menjadi dasar, penjas, dan petunjuk pelaksanaan dalam merumuskan kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah.

7.1. Strategi Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah

Walau Juma (2005, 2011) menuliskan dua dimensi pengembangan kawasan berbasis bioteknologi, yaitu; aspek teknis dan kelembagaan. Kemudian, kawasan fungsional (ketimbang administratif) menjadi dimensi penting diseminasi bioteknologi peternakan (Anderson dan Hoff, 1993). Apalagi, satu kawasan berbeda dengan daerah lain. Sehingga, kondisi khas kawasan (iklim, budaya dan lingkungan) menjadi penentu sukses.

Untuk itu, strategi dalam mengatasi kendala dan upaya percepatan pengembangan kawasan peternakan sapi amat mendesak. Tujuannya agar peternak berskala usaha kecil dalam suatu kawasan bisa bertahan dan melanjutkan kehidupan. Pada dasarnya ialah pendekatan terpadu sebuah kawasan yang menghargai keberagaman budaya dan alam lingkungan. Kesidou (2007) menyusun ruang lingkup teori untuk pengembangan kawasan. Simak Tabel 7.1.

Tahapan persiapan pengembangan kawasan peternakan, dapat dibagi pada kategor berikut ini; Pertama, **membangun sumberdaya (aset)**. Aspek ini meliputi akses terhadap lahan, pasar barang modal/inputs, investasi pada sumberdaya insani (pendidikan dan pelatihan), dan pembentukan modal sosial. Kebijakan kunci buat peternak mencakup hal seperti; akses penggunaan air dan lahan, bantuan untuk pendidikan dan kesehatan, skim pinjaman modal dan bibit, penyediaan pupuk/ pakan, dan penelitian terapan memperbaiki sistem pengelolaan.

Kedua, **integrasi dengan pasar** dalam arti fisik, komunikasi dan informasi teknologi. Tujuannya untuk mengurangi biaya transaksi dan

Feasibility Study
Pembangunan *Kawasan* *Sentra* *Peternakan* *Sapi* *perah*

mendorong mobilitas tenaga kerja. Kuncinya adalah investasi infrastruktur dalam pola mitra/ kerjasama pemerintah & swasta. Kemudian, skim pemasaran dan penyimpanan produk, system peringatan dini serta peduli dengan kelestarian lingkungan.

Ketiga, **pengembangan institusi & kelembagaan**, termasuk membina dan menguatkan kerjasama dan koordinasi. Kemudian, asuransi dan inovasi menyelesaikan kendala sumberdaya dan pengetahuan. Selanjutnya menumbuhkan sinergi mendorong keunggulan komparatif dan kompetitif kawasan. Sehingga muncul daya tarik kawasan dari pihak luar. Bentuk kebijakannya meliputi skim keuangan mikro, program perbaikan lahan dan air serta jejaring pemasaran produk.

Tabel 4.2. Teori Utama tentang pengembangan aglomerasi kawasan

Ranah Teori	Pertanyaan	Manfaat	Kelebihan pengetahuan	Institusi	Kompetisi atau
Geografi Ekonomi baru (Krugman 1995; Krugman dan Venables 1995)	Kenapa aktivitas ekonomi terkonsentrasi	Manfaat ongkos murah pada pertukaran produk / tenaga kerja / pelayanan	Kelebihan pengetahuan dan institusi tidak dipertimbangkan sebagai alasan penting penerapan kawasan		Kompetisi adalah cara kawasan mempengaruhi usaha. Modelnya kompetisi tidak sempurna
Geografi ekonomi (Jaffe, 1993)	Kenapa aktivitas inovatif	Tidak penting	Jawaban terjadi hanya kawasa	Tidak dipertimbangkan	Peran relasi pasar tidak dipertimbangkan
Ruang industri baru (Porter, 1990; Storper dan Scott)	Kenapa usaha dlm kawasan lebih kompetitif dan inovatif	Lumayan penting (Porter, 1990)	Kelebihan ilmu pengetahuan mendorong inovasi	Institusi menguatkan relasi dalam usaha	Kerjasama pemasok dan pengguna mendorong inovasi dan daya saing
Distrik industri (Piore dan Sabel 1984; Schmitz 1999)	Kenapa usaha dalam kawasan lebih kompetitif ketimbang yang diluar	Sistem produksi fleksibel dari aneka usaha kecil yang khas. Ia terkait secara vertikal melalui cepatnya respon	Kelebihan ilmu tidak banyak dibahas secara terbuka. Tapi Schmitz (1999) mencatat pertemuan	Keterkaitan sosial lebih penting ketimbang institusi formal	Usaha ada kerjasama yang berbasis pada kepercayaan dan pertukaran (institusi informal)
Lingkungan atau milieu inovatif (Aydalot,	Kenapa usaha dalam kawasan lebih	Kurang penting, fokus pada relasi	Menempatkan belajar dalam pusat	Institusi lokal mendorong dinamika inovasi	Posisi kompetisi tidak jelas. Pelaku lebih suka saling

			diseminasi dalam milieu	pelaku dan institusi formal	masuk kategori kerjasama.
Sistem inovasi & pembelajaran dalam daerah (Morgan, 1997; Cooke, 2001)	Kenapa usaha dalam kawasan lebih inovatif ketimbang yang diluar	Kurang penting, lebih fokus pada Inovasi	Ilmu tersuruk sbg pendorong kawasan. Interaksi tatap muka mendorong diseminasi ilmu yang tersuruk	Analisa utama pada institusi formal	Posisi kompetisi tidak jelas. Pelaku lebih suka saling percaya dan berbagi (masuk kerjasama). Ada peran lingkungan sosial budaya

Sumber : Kesidou, Efthymia (2007)

Dengan begitu, ditengah kecendrungan desentralisasi, dekonsentrasi dan devolusi kebijakan (UU 17/2003, 25/2004, 33/2004, 23/2014) maka, pengembangan kawasan buat keberdayaan petani berskala kecil perlu sinkron. Misalnya, kelenturan dalam kerangka yang bisa menyahuti peluang dan kebutuhan daerah dengan jitu. Lalu, proses dan hasil yang membawa kepada keberdayaan peternak. Soalnya ialah, kebijakan dan jalan menuju keberdayaan itu.

Dari kondisi terkini kawasan usaha berskala kecil yang beragam, maka sejumlah hal perlu perhatian. (1) Upaya memperbaiki akses kepada sumberdaya dan teknologi. Tujuannya untuk membuka ruang bagi peternak bekerja sama dan saling melengkapi keperluan dalam sistem pertanian terpadu untuk meraih efisiensi. (2) Memperkuat diversifikasi pilihan kehidupan dan mata pencarian dengan sentuhan (bio)teknologi pada rantai hulu-hilir usaha dengan pendekatan agribisnis. Caranya melalui investasi sumberdaya insani dan modal sosial rumah tangga. (3) Upaya mengurangi resiko bencana melalui jaminan asuransi, pertukaran dan jejaring kerja yang memperbaiki daya tahan mereka. Perhatikan kondisi kawasan di ‘darat’ provinsi Sumatera Barat pada Tabel 7.2. Tentu, sebagai benchmark. Hikmah atau pelajaran dari berbagai pendekatan kawasan meliputi; perencanaan dan penerapannya, kerangka kelembagaan, strategi dan inisiatif (Evans dan Munir, 2002):

- 1) **Perencanaan dan penerapannya.** Ada gap antara rencana dan penerapannya. Banyak pihak mengerjakan diskusi, penelitian, dokumentasi, menyusun

2) rencana dan menyusun anggarannya. Tetapi, tidak banyak yang dilaksanakan, apalagi berhasil dengan baik. Maka, hal ini perlu dijadikan dasar pengembangan usaha, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Dalihnya sebagian tertumpu pada pengalaman daerah yang belum mampu mendorong pengembangan kawasan.

Tabel 4.3. Strategi Pengembangan kawasan Usaha Sapi perah yang pernah ada di Sumbar

No	Pola & strategi	Tujuan	Kondisi minimum	Aktivitas Peran Pemda
1	Mendorong potensi usaha peternak sapi perah lokal	<ul style="list-style-type: none"> → Mendorong usaha peternak lokal – yang sementara sifatnya – untuk lebih maju; sebelum bersaing dengan pasar lintas negara. → Dalihnya: WTO sepakat pada adanya batasan impor, yang dapat dilakukan melalui kebijakan tarif disebut 'tariffs only' → mengisi peluang yang terbuka dengan adanya RPH maju 	<ul style="list-style-type: none"> → Sudah ada program sapi perah sebelumnya → Sudah ada aneka skim pinjaman modal usaha → sudah ada lembaga keuangan mikro → sudah ada teknologi pakan, dan produksi → cek dan pengendalian kualitas teknologi IB dan bakalan → pengendalian carving interval, CR dan SC mencapai standar optimal → pastikan tidak terjadi: → peternak lokal jarang yang bisa bersaing harga dengan pelaku lintas negara. → sering RPH, akhirnya hanya buat peternak besar, peternak kecil dan miskin terlempar keluar. → Akses yang tidak adil pada RPH membawa elitis dan ketimpangan hasil pembangunan → tidak memadainya kualitas SDM dan 	<p>On farm.</p> <ul style="list-style-type: none"> → ketersediaan dan standarisasi kualitas pakan sapi → standarisasi jenis dan spesifikasi bibit → standarisasi hasil daging, kadar lemak dan air → standarisasi teknis pemeliharaan dan pencegahan penyakit <p>Off farm</p> <ul style="list-style-type: none"> → Fasilitasi akses peternak dengan skim pinjaman modal perbankan → Fasilitasi akses sesama peternak untuk bertukar informasi pasar, teknologi dan dorongan semangat berusaha. → Akses peternak dengan manajemen RPH untuk kontrak pemasok sapi. → fasilitasi transaksi sapi dengan harga kontan dan berdasarkan berat badan → fasilitasi pelatihan dan inovasi melalui penelitian terapan

*Feasibility Study
Pembangunan*

Kawasan

Sentra

Peternakan

Sapi

perah

			keuangan mengurangi efisiensi. Ini jadi titik kritis mempertahankan dorongan pada peternak didalam kawasan	pendukung usaha sapi pedaging → fasilitasi wadah dan kerjasama antar peternak mendukung kreatifitas pelaku usaha lokal → fasilitasi penetapan quota pemasukan sapi, bila permintaan RPH diatas dari kapasitas pasokan peternak lokal → koordinasi penyediaan infrastruktur yang tepat waktu, lokasi, pelaku dan kegunaannya.
2	Memasukan sapi dari luar	Menambah input sapi untuk kawasan Caranya dengan strategi tiga.	→ Dilakukan HANYA bila pasokan sapi lokal tidak mencukupi → Mestinya peternak menanam modal pada teknologi peningkatan produktifitas, tapi pelaku pasar menjadi terbuai karena dapat konsesi istimewa dipasar lokal. Bisa bisa, investasi tidak jadi terlaksana.	On farm Tidak ada Off farm → penetapan tarif impor yang melindungi peternak lokal → pastikan adanya quota pemasukan sapi dan cara penerapannya yang efektif. → siapkan kebijakan jangka panjang untuk mengatasi pemasukan sapi, termasuk mendorong efisiensi usaha peternakan pengadaan infrastruktur pendukung, layanan teknis dan kesehatan yang membawa pada standar daya saing internasional.
3	Membina kemitraan usaha antara peternak dan pengusaha	→ membuka kerjasama antara peternak kecil dan besar, dimana sering peternak kecil lemah daya tawarnya. → Aturan kemitraan dengan dukungan pemda bisa berjalan, termasuk harga, penyuluhan dan pelatihan.	→ pilihan ketika strategi dua perlu dilakukan → usaha besar cenderung tidak adil dan diskriminasi pada peternak kecil. Jadi, ingat kontrak kemitraan tidak selalu membawa pada pertumbuhan ekonomi → banyak peternak kecil tidak berusaha pada kawasan dan kesulitan bertransaksi	On farm: Tidak ada Off farm → menumbuhkan sistem pengumpulan informasi harga pasar, termasuk identifikasi dengan berbagai sumber, seperti pemda, peternak, pedagang dan pihak terkait lain, sepanjang rantai pemasaran. → fasilitasi manajemen pemrosesan dan pemasaran berjanji membeli sebagian atau

		<p>→ kemitraan menghindari usaha monopoli sepanjang aturan tegak dan keuntungan bisa dinikmati peternak</p> <p>→ meraih efisiensi dengan mengurangi biaya penjajakan.</p> <p>→ meraih efisiensi via pengurangan biaya kontrak, konsultasi, pajak dan pengakuan pemda.</p>	<p>→ keterbatasan kapasitas pemda menyulitkan upaya pendesakan kerangka kerja hukum guna menjamin berjalannya kontrak mitra dengan jitu dan benar.</p> <p>→ pengalaman kemitraan pada unggas nampak lebih membuat peternak kecil kian merana, maka kemitraan pada sapi belum banyak pengalaman yang bisa digali.</p>	<p>semua ternak dengan harga yang kontan dan sudah disepakati pada awalnya.</p> <p>→ memastikan pihak mitra melayani peternak dengan input produksi seperti bibit, pakan, pelatihan dan tata cara pemeliharaan. Bisa juga akses pada paket kredit, harga, asuransi dan kualitas pada saat transaksi.</p> <p>→ Pemda mendorong kemitraan dan memantau proses perjalanannya dengan memastikan bahwa tujuan pemberdayaan peternak memang terwujud</p> <p>→ membina sistem hukum yang mendorong usaha, pemda mesti cepat dan tepat mengatasi potensi sengketa, dengan biaya murah.</p>
--	--	---	--	--

Sumber: Disnak Sumbar (2011).

Selanjutnya, perubahan gaya kerja, kemampuan dan keahlian termasuk sisi kelemahan daerah. Kemudian, pemahaman pada sistem, rumusan bentuk dukungan dan penggalangan sumberdaya untuk mengatasi tantangan yang berubah. Maka, sinergi, kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dan pihak swasta menjadi pilihan yang tersedia. Ketika, kawasan hendak dibuka, perlu cara cara baru agar pelaku ini berbagi dengan pemda dalam perencanaan dan penerapannya.

- 2) **Kerangka kelembagaan.** Pemda perlu perubahan mendukung pengembangan ekonomi melalui pendekatan kawasan. Misalnya, peran baru pemda, kerjasama dengan pelaku usaha, struktur organisasi dan anggaran.

Peran pemda ialah memfasilitasi pengembangan kawasan ekonomi, serta cara baru menyalurkan kebutuhan peternak dan usaha skala besar. Tegasnya ini adalah perubahan cara berfikir dari arah 'proyek' pada mengisi peluang pasar dan menjawab kebutuhan.

Kerjasama pemda dengan pelaku usaha. Upaya ini dimulai dari kelompok kerja kecil yang mengagaskan pentingnya untuk berbagi. Pengusaha tidak perlu ceramah dan pengangkatan menjadi pembina. Mereka sudah sibuk dengan usahanya. Maka, yang perlu adalah berbagi dalam pengambilan keputusan atau memberikan sebagian wewenang membuat keputusan pada pelaku usaha.

Struktur organisasi dan anggaran. Kesulitan struktur pemda ialah terpisahnya tanggungjawab tiap sektor. Sehingga juga menyulitkan pengembangan kawasan dalam arti lambatnya respon untuk peluang yang terbuka. Kerap pula siklus anggaran membatasi akselerasi rencana. Ada jarak waktu antara rencana dan anggaran tiba, yang jelas menghilangkan momen usaha. Maka, prosedur anggaran mesti dicermati.

- 3) **Strategi dan inisiatif.** Cara mendorong pengembangan kawasan memang bervariasi. Disini ukuran keberhasilan bukan jumlah pertemuan, laporan dan ikut pelatihan atau jumlah pinjaman yang diperoleh. Tapi jumlah penjualan dan peningkatan pendapatan. Maka, mendorong usaha peternak skala kecil adalah menyelesaikan masalah penjualan dan pasar yang membutuhkan pemahaman jejaring dan rantai antara peternak, pedagang / tukang Perah dan pasar.

Pendekatan berikutnya bantuan teknis. Pelajaran bantuan teknis adalah memfasilitasi langsung kepada peluang pasar dan pembeli khusus untuk tujuan ekspor. Peternak, misalnya, bisa meraih standar kinerja bila

perusahaan pengelola memberikan petunjuk dan spesifikasi kebutuhan serta fasilitas untuk meraihnya.

Selanjutnya, dukungan pinjaman dana buat peternak juga menjadi salah satu strategi. Dalam kaitan ini mulai dari SPSS (satu petani satu sapi), KUPS, KUR, dan KKPE dan jenis pinjaman lain bisa mendukung cluster.

Maka, ada dua hal yang mesti pemerintah daerah lakukan; (a) investasi di infrastruktur dan (b) membina suasana lingkungan berusaha. Bila kondisi dan lingkungan ramah, jelas usaha bisa bertambah, meski infrastruktur lemah. Maka, investasi infrastruktur perlu dilakukan secara selektif. Sehingga menjaga dan membina kondisi berusaha menjadi pilihan utama. Pastikan bahwa lingkungan berusaha pada cluster langsung berpengaruh buat perbaikan keunggulan kompetitif dan prospek pertumbuhan.

Sejumlah hal perlu dicermati seperti; aturan dan regulasi, prosedur administrasi, pajak dan insentifnya, serta cukai informasi. Semua ini mempengaruhi usaha dan perdagangan. Sebab, kerap aspek ekonomi sebuah aturan tidak menjadi pertimbangan dan perhitungan. Perhatikan pula kasus berikut, seperti;

- rumitnya kelengkapan syarat administrasi sebelum usaha berjalan mengurangi daya saing dan waktu memulai usaha.
- lamanya prosedur administrasi memakan waktu, menghilangkan peluang dan menjadikan biaya tinggi.
- penundaan izin dan untuk mendirikan bangunan menaikkan ongkos dan biaya pembangunan.
 - pajak dan kutipan pada pemindahan barang melintasi daerah tertentu menaikkan biaya angkut.
- adanya biaya 'pelayanan' untuk mempercepat administrasi, upah tenaga kerja minimum.

Bisa jadi, semua ini menjadi pemicu pindahnya usaha atau malah menutup usaha

sama sekali. Maka, strategi pilihan adalah mengembangkan kawasan dengan melibatkan semua pelaku usaha. Jadi, kawasan mesti dipilih sesuai dengan dukungan kondisi daerah dan permintaan pasar. Para pelaku pembantu seperti pemicu inovasi dan penelitian terapan juga ikut serta. Semua mereka menjalin komunikasi dan jejaring kerjasama serta kemitraan. Kesimpulannya, kawasan perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut;

1. **Prinsip Penerapan.** Pengembangan kawasan mesti diikuti dengan tindak dan kerja nyata yang menghasilkan. Mulai pekerjaan dengan yang sederhana tapi masih bisa dikelola. Ia mesti mampu memberi bukti, bukan janji. Maka, kawasan mulai dari lembaga yang ada, melanjutkan topik dan inisiatif yang sudah tersedia. Pastikan hasilnya tercapai dengan cepat dan memuaskan para pihak. Ini mendorong semangat untuk lebih maju.
2. **Prinsip Ekonomi.** Usaha dalam kawasan mulai dari mengisi permintaan dan peluang yang terbuka. Sebaiknya fokus pada kesempatan diluar, atau malah pasar ekspor. Pastikan pula bahwa pengaruh ikutan dari usaha bisa merambah banyak peternak. Pengambil kebijakan dan pelaksananya di Penda perlu komitmen dan kinerjanya.
3. **Prinsip Kelembagaan.** Pendekatan lembaga membuka peluang pelaku untuk ikut serta dalam perencanaan dan mengambil keputusan. Hal ini memerlukan adanya identifikasi pihak terkait (peternak, swasta, pemerintah) yang sepakat untuk mendorong pengembangan kawasan. Khusus pihak peternak dan swasta perlu melakukan peran pro-aktif dalam forum. Hindari peran penda yang dominan. Maka, peran fasilitasi menjadi penting untuk melahirkan gagasan, inisiatif dan menggerakkan sumberdaya.

7.2. Kebijakan Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah

Nogales (2010), mengatakan peran kebijakan pemerintah ialah membuka suasana

yang memungkinkan bagi pengembangan kawasan peternakan ternak sapi perah. Hanya saja cermati pula bahwa peran pemerintah kerap justru menjadi penghalang ketimbang pelancar pengembangan. Secara teoritis intervensi kebijakan bisa terjadi berupa;

- a. Perbaiki insentif buat peternak dan pelaku agribisnis. Pilihan yang optimal ialah kombinasi peluang pasar, keuangan dan investasi. Tidak ada resep dan kiat mujarab untuk semua kawasan. Sebab, tiap kawasan mempunyai cirinya sendiri. Untuk itu perlu kreatifitas menyikapinya.
- b. Mencukupi kebutuhan barang publik. Pengembangan kawasan amat tergantung pada pembangunan infrastruktur. Misalnya, sumber air, jalan, pengangkutan, listrik dan komunikasi. Kemudian pasar, lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian. Masalah yang kerap muncul adalah kesenjangan antara kebutuhan dengan penyediaan infrastruktur. Pastikan bahwa koordinasi investasi terjadi pada setiap tingkat kabupaten, propinsi dan nasional serta perbaikan jejaring usaha berjalan dengan memberdayakan.
- c. Perbaiki iklim investasi pihak swasta berupa kemitraan bidang pertanian. Iklim investasi tergantung pada infrastruktur dan beberapa kebijakan lain. Contohnya, aturan pemasaran, sistem informasi, lembaga keuangan, dan pengelolaan resiko. Selanjutnya keamanan hak dan akses atas sumberdaya lahan dan air. Iklim ini juga mestinya menarik perguruan tinggi dan penelitian untuk menyumbangkan inovasi.
- d. Mengembangkan institusi yang efektif. Sejumlah institusi berperan pada efektifitas kelembagaan ini; (1) institusi yang mendorong terjadinya tindakan bersama dalam kawasan. (2) penumbuhan aturan dan lembaga payung yang mendukung pengembangan kawasan.
- e. Mengurangi kendala dari alam lingkungan. Hal ini memastikan bahwa sumberdaya alam seperti hutan, air dan lingkungan terjaga secara berkelanjutan. Dengan demikian kawasan tetap berjalan dalam jangka waktu lebih lama.

Kemudian beberapa prinsip menjadi dasar bagi intervensi ini, seperti;

Feasibility Study
Pembangunan *Kawasan* *Sentra* *Peternakan* *Sapi* *perah*

1. Semua pelaku usaha kecil yang terkait bisa menjalin kerjasama dalam aktivitas kawasan. Kebijakan mesti berpihak kepada usaha kecil ini.
2. Inisiatif kawasan mesti mendorong kewirausahaan dari dalam kawasan melalui contoh dan teladan.
3. Gunakan pendekatan yang berbeda pada beragam kasus. Jangan samakan saja cara, kiat dan pola mengatasi masalah untuk semua persoalan. Hal ini perlu kreatifitas, pemberdayaan, pedelegasian wewenang dan kelenturan.
4. Pendekatan partisipatif, terbuka dan merujuk pada fakta lapangan menjadi bagian utama dalam pengembangan kebijakan.
5. Hindarkan sejumlah hal seperti; kerusakan lingkungan, kelangkaan tenaga kerja dan standar kualitas serta upah. Kemudian, antisipasi mengerucutnya penerima manfaat kawasan bagi usaha skala besar, ketergantungan pada satu jenis produk utama, dan ketergantungan dengan pihak luar dalam arti proses pembelajaran.

7.3. Program Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi Perah

Program pembangunan kawasan peternakan merupakan turunan dan sesuatu yang konsisten dengan kebijakan dan strategi pengembangan. Ringkasan yang konsisten dari ketiganya tercantum pada Tabel 7.3. Sedang Tabel 7.4. merupakan indikator sukses dan kinerja dari kawasan itu sendiri. Memang, pada poin 7.2. dan 7.3. mengenai strategi dan kebijakan ikut disajikan kerangka konsep dan teori mengenai pengembangan kawasan. Kemudian pengalaman di ‘darat’ Sumatera Barat, sebagai pembanding. Kendati paparan didukung dengan fakta yang lebih dahulu berkembang.

BAB VIII. PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil kajian Feasibility Study Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai ini diantaranya adalah:

1. Untuk mewujudkan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai membutuhkan landasan hukum atau dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan. Hal ini berkaitan dengan produk kebijakan tentang pembangunan peternakan sapi perah yang dimiliki pemerintah. Fakta yang ada saat ini, belum ada satupun produk kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai terkait pembangunan peternakan sapi perah, khususnya untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah. Baik itu produk kebijakan yang bersifat makro, meso, dan mikro.

2. Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah tentunya membutuhkan dukungan prasarana dan sarana yang berkaitan dengan pembangunan peternakan sapi perah. Kondisi yang ada saat ini di Kabupaten Kepulauan Mentawai, belum memiliki sarana dan prasarana pembangunan peternakan sapi perah yang lengkap. Adapun prasarana dan sarana yang dibutuhkan disini diantaranya adalah:
 - Lahan: lahan hijauan pakan ternak, lahan pengembalaan, lahan perkandangan dan lahan perkantoran;
 - Perkantoran/Bangunan: Kantor UPTD Pembibitan dan Budidaya Sapi perah; Rumah Perah Hewan (RPH); Pasar Ternak; Pos Inseminasi Buatan (IB); Pos Kesehatan Hewan; Kandang sapi perah milik pemerintah;

- Jalan
 - Sumber dan ketersediaan air yang bersifat adlibitum (berkesinambungan)
 - Sumber energi
 - peralatan milik pemerintah: Alat/mesin peternakan dan kesehatan hewan; Bibit ; Pakan; Obat hewan, strow stresing.
3. Berdasarkan data yang didapatkan, kondisi ketersediaan input produksi peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai masih membutuhkan tindakan optimalisasi oleh pemerintah. Untuk ketersediaan lahan, pemerintah dan masyarakat memiliki alokasi lahan yang memadai. Namun demikian, input produksi seperti ketersediaan SDM peternak, sumber pakan ternak sapi perah yang berkualitas, ketersediaan Sapi Betina Produktif dan Bibit Ternak Sapi perah dan teknologi, masih perlu dioptimalkan ketersediaannya oleh pemerintah.
4. Dilihat dari beberapa aspek sosial ekonomi masyarakat calon pelaku utama (peternak sapi Perah) dalam melaksanakan pembangunan peternakan sapi perah, berada dalam penilaian sedang. Hal ini dikarenakan beberapa dari aspek tersebut, seperti tingkat pendidikan, pengalaman dan budaya beternak sapi perah, pekerjaan utamanya bukan peternak sapi perah, berada pada kondisi yang masih membutuhkan tindakan otimalisasi dari pemerintah.
5. Saat ini pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai masih minim dengan keberadaan kelembagaan pendukung pembangunan peternakan sapi perah. Kelembagaan pendukung tersebut dapat saja dimiliki oleh pemerintah seperti UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak, Pos Keswan, RPH, dll. Begitu juga kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat (peternak) seperti Kelompoktani Ternak, Kelompok Agribisnis Peternakan.

6. Kondisi keuangan daerah yang cukup terbatas, membuat sumber permodalan / pendanaan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah diusahakan dari berbagai sumber, seperti dana pemerintah daerah, dana pemerintah provinsi, dana pemerintah pusat, investor (swasta).
7. Saat ini pemasaran sapi perah di daerah ini baru sebatas pemenuhan kebutuhan masyarakat Mentawai dan sebagian kecil ada yang dipasarkan ke daerah Sumbar Daratan, seperti Kota Padang. Kedepan perlu dilakukan pengembangan segmen pasar untuk mendukung pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah.
8. Kondisi Kerjasama antar Lembaga dalam Pembangunan Peternakan Sapi Perah berada dalam penilaian sedang. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah dibutuhkan sinergitas dan atau kerjasama yang baik antar OPD terkait di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
9. Indikator yang digunakan untuk menetapkan calon lokasi kawasan sentra peternakan sapi perah, diantaranya adalah:
 - a) Lahan Kebun Hijauan Makan Ternak (HMT):
 - Kemiringan lahan maksimum 40%
 - Tersedia air yang cukup di lahan
 - 1 kelompok tani mengelola \pm 10 Ha kebun HMT
 - Luas 1 hamparan HMT \pm 1 Ha
 - Lahan budi daya areal persawahan
 - Lokasi disesuaikan dengan RTRW
 - Lokasi telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau yang membidangi peternakan melalui SK Penetapan Lokasi.
 - Lokasi memiliki status kepemilikan yang jelas
 - Lokasi mudah dijangkau dan bebas banjir.
 - Lokasi memiliki aksesibilitas yang baik.

- Lokasi bebas banjir.
- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program sejenis.
- Lokasi berada dalam wilayah kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

b) Lahan Padang Pengembalaan:

- Kemiringan lahan untuk padang pengembalaan maksimal 15%.
- 1 kelompok tani diupayakan minimal mengelola 10 Ha.
- Luas padang pengembalaan diupayakan minimal 5 Ha per hamparan.
- Memiliki ketersediaan air yang cukup.
- Lokasi disesuaikan dengan RTRW.
- Lokasi telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas atau yang membidangi peternakan melalui SK Penetapan Lokasi.
- Lokasi memiliki status kepemilikan yang jelas
- Lokasi mudah dijangkau dan bebas banjir.
- Lokasi memiliki aksesibilitas yang baik.
- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program sejenis.
- Diutamakan lokasi yang memiliki vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang, hutan ringan).
- Kesesuaian lahan untuk tumbuhan hijauan makanan ternak.
- Lokasi berada dalam wilayah kerja Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

Berdasarkan indikator tersebut, didapatkan calon lokasi untuk kawasan sentra pembangunan peternakan sapi perah terdapat pada 5 (lima) kecamatan, seperti:

- Kecamatan Pagai Selatan : Desa Malakopak, Bulasat, Sinaka
- Kecamatan Pagai Utara : Desa Saumanganya
- Kecamatan Sipora Utara

d) Kecamatan Siberut Tengah : Desa Saibi Samukop e)

Kecamatan Siberut Utara : Desa Sotboyak

Namun demikian, lokasi tersebut belum terakomodir dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Oleh karena itu, kedepannya lokasi ini diharapkan dapat terakomodir di dalam RTRWD Kab.Kep. Mentawai.

10. Road Map Pencapaian Pembangunan Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah disusun dengan beberapa tahapan pelaksanaan, diantaranya adalah:

a) Tahap Persiapan dilaksanakan pada tahun 2019-2023

b) Tahap Pengembangan dilaksanakan pada tahun 2024-2028

c) Tahap Percepatan dilaksanakan pada tahun 2029-2033 d)

Tahap Pemerataan dilaksanakan pada tahun 2034-2038.

11. Adapun kebijakan yang dapat diambil pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk tahapan persiapan (2019-2023) melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah, diantaranya adalah:

a) Menyusun dan Mengesahkan Produk Kebijakan yang Bersifat Regulator dan Prosedural

b) Mempersiapkan ketersediaan prasana dan sarana.

c) Optimalisasi Sumberdaya manusia sebagai pelaku dalam pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah

d) Penumbuhan Kelembagaan untuk pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah

e) Mengkontruksi Sistem / manajemen

f) Persiapan sistem dan mekanisme Permodalan / pendanaan pembangunan kawasan Sentra peternakan Sapi perah.

g) Membangun sistem Pemasaran produk utama dan turunan ternak sapi perah.

Keseluruhan kebijakan tersebut memiliki turunan beberapa program

*Feasibility Study
Pembangunan*

Kawasan

Sentra

Peternakan

Sapi

poton

pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

7.2. Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan pada laporan antara ini, diantaranya adalah:

1. Diharapkan pemerintah daerah dapat merumuskan dan melahirkan produk kebijakan bersifat regulator dan prosedural untuk mengamankan dari sisi hukum dan menjadi dasar dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Adapun produk hukum yang paling mendasar terkait hal ini adalah Peraturan Bupati Tentang Penetapan Lokasi Kawasan Sentra Peternakan Sapi perah yang mengacu kepada PERDA Tentang RTRW Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Pembangunan kawasan sentra peternakan sapi Perah sebaiknya diiringi oleh pembangunan prasarana, sarana, SDM peternakan, kelembagaan, dan pemasaran supaya tujuan dari pembangunan ini dapat tercapai lebih baik.
3. Perlu dibangun sebuah model atau kelembagaan yang menjadi fasilitator untuk mewujudkan sinergitas antar lembaga pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kawasan sentra peternakan. Hal ini dikarenakan pembangunan kawasan sentra peternakan tidak bisa dilaksanakan oleh 1 OPD saja, namun akan membutuhkan dukungan banyak OPD terkait dengan kegiatan pembangunan ini.
4. Diharapkan pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat mengakomodir lokasi calon kawasan sentra peternakan sapi perah kedalam RTRWD.
5. Untuk membantu terwujudnya tujuan pembangunan kawasan sentra peternakan sapi perah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai disarankan untuk memfokuskan pada tahapan persiapan sebagai landasan untuk melanjutkan pada tahapan berikutnya.

*Feasibility Study
Pembangunan*

Kawasan

Sentra

Peternakan

Sapi

poton

6. Sistem pengelolaan kawasan dan pengelolaan peternakan sapi perah, pemerintah ini dapat mengacu pada:

- Pedoman Teknis Perluasan Areal Peternakan (Direktorat

perluasan dan pengelolaan lahan, Kementan 2014).

- Petunjuk Teknis Teknologi Inovasi Pakan Murah untuk Usaha Pembibitan Sapi perah (Pusat penelitian dan pengembangan peternakan, Deptan 2007).
- Petunjuk Teknis Perkandangan Sapi perah, Pusat Penelitian dan Pengembangan peternakan, Deptan 2007.
- Pedoman Pembibitan Sapi Perah yang Baik (Direktorat Perbibitan Ternak, Kementan, 2014).

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi. Alfabeta. Bandung.
- Anderson, J.E. 1990. Public Policy Making: An Introduction. Boston: Mifflin. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai. 2017. Kepulauan Mentawai Dalam Angka 2017. Tuapejat.
- Blakely, J and D.H. Bade. 1991. Ilmu Peternakan. Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bappenas 2004. Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan : Untuk Percepatan pembangunan Daerah, Jakarta, Bappenas.
- Creswell, J.W. 1995. Research Design: Qualitative and Quantitative Approches. London: Sag Publications.
- Creswell, J.W. 2014. Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan, alih bahasa: Ahmad Lintang Lazuardi. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Creswell, J.W. 2016. Resarch Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran, Penerjemah: Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini Pancasari . Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Dinas Peternakan Sumatera Barat. 2010. Populasi ternak sapi perah di Sumatera Barat.
- Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2015.Laporan Dinas Peternakan TK.I.Sumatera Barat. Padang.
- Dunn, N William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Ke Tiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Edwardi. 2016. Prospek peternakan sapi perah di Sumatera Barat. Dinas Peternakan TK.I Sumatera Barat. Padang
- Ervin, Alexander M. 2000. Applied Anthropology: Tolls and Perspectives for Contenpory Practice. Boston: Allyn and Bacon.
- Hamidi. 2005. Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian.UMM PRESS. Malang.
- Heny Leondoro. 2009. Dasar Ternak Perah. Fakultas Peternakan Universitas Kanjuruhan, Malang
- Hogwood, B.W dan Gunn, L. 1986. Policy Analysis for the Real Word. Oxford: University.
- Kementerian Peretanian. 2014. Pedoman Teknis Perluasan Areal Peternakan. Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan. Jakarta.
- Ma'arif, S. 2000. Pengertian Dasar Dan Esensi Pengembangan Wilayah. , Semarang, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Mahi, K. A. 2016. Pembangunan Wilayah Teori & Aplikasi. Kencana. Jakarta.
- Marzali. A. 2012. Antropologi dan Kebijakan Publik. Kencana Perdana Media Grouop. Jakarta.

- Matitaputty, P.R. dan B. Kuntoro. 2010. Potensi dan Strategi Pengembangan Kawasan Peternakan Ruminansia dan Pemanfaatan Limbah Tanaman Pangan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). *Jurnal Peternakan*. Vol 7, No. 2: 70–81.
- Noer, Melinda. 2008. Peran kelembagaan Lokal dalam Perencanaan Desentralistis di kabupaten tanah Datar - Propinsi Sumatera Barat. Disertasi. Instiut Teknologi bandung. Bandung.
- Noer, Melinda. 2017. Buku Ajar Perencanaan Pembangunan Wilayah Era Desentralisasi. Rumah Kayu Pustaka Utama. Padang.
- Parsons, W. 2001. Public Policy Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan. PT Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- RI, Pemerintah. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Jakarta.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S. & Panuju, D. R. 2011. Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta. Bandung.
- Suharto, E. 2005. Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial Edisi Revisi. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, A.S. 1997. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Bumi Akasara. Jakarta.
- Wibawa, S. 2011. Politik Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.

BIODATA EDITOR



Evitayani dilahirkan di Padang pada bulan Oktober 1973, adalah dosen dan peneliti di bidang Hijauan Pakan Ternak, Departemen Industri Nutrisi Ternak Pakan , Fakultas Peternakan Universitas Andalas (Unand). Setelah menamatkan studi S-2 dan S-3 dalam bidang Nutrisi Ternak di Shimane dan Tottori University, Japan tahun 2003 dan 2006, penulis menekuni bidang tersebut dan mendesiminasikan beberapa inovasinya ke masyarakat khususnya Desa Tertinggal, Terkebelakang dan Termiskin (3T) melalui beberapa workshop, pelatihan, seminar, pendampingan dan konsultan serta ikut merancang kawasan produksi dan peternakan berbasis sumber daya lokal berupa hijauan dan legume. Banyak paper dan karya ilmiah yang ditulis. Bukunya berjudul Terobosan Teknologi Budidaya Pertanian merupakan buku pertama yang ditulis untuk mahasiswa dalam memahami teknologi pemanfaatan Fungi Mikoriza Arbuskula sebagai bioteknologi untuk memperpanjang penyerapan unsur hara melalui hyphae. Penulis sangat sering mendapatkan dana penelitian dari Kemenristek Dikti dan melakukan perjalanan keluar negeri untuk seminar serta melakukan kerjasama dengan berbagai Universitas di Jepang seperti Hiroshima University, Nara Institute , Nagahama Institute dan dengan perusahaan Nagahama yang berbasis pakan Organik. Penulis juga anggota Himpunan Ilmu Tumbuhan Pakan Indonesia (HIPTI).